

KK  
TE.05/06  
P  
P

## TESIS

# PENGARUH PERUNTUKAN LAHAN PEMUKIMAN TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI TAMBAH DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL DI KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



**BAHRUNSYAH**  
**NIM. 090010139 L**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2005**

**PENGARUH PERUNTUKAN LAHAN PEMUKIMAN  
TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI TAMBAH DAN  
PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL  
DI KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Manajemen  
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**BAHRUNSYAH  
NIM. 090010139 L**

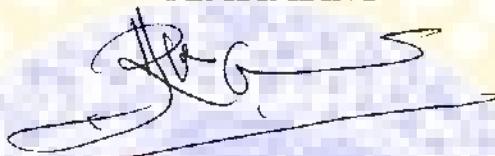
**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
Tanggal 20 Mei 2005**

## LEMBAR PENGESAHAN

**MATERI TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL.....2005**

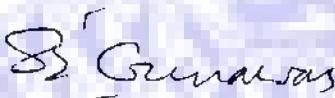
**OLEH**

**PEMBIMBING**



**PROF. DR. H. SUROSO IMAM ZADJULI, S.E  
NIP. 130355369**

**MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



**DR. SRI GUNAWAN, M. COM  
NIP. 131653420**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

Telah diuji pada tanggal 20 Mei 2005

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**KETUA : Prof. Dr. H. Effendi, SE**

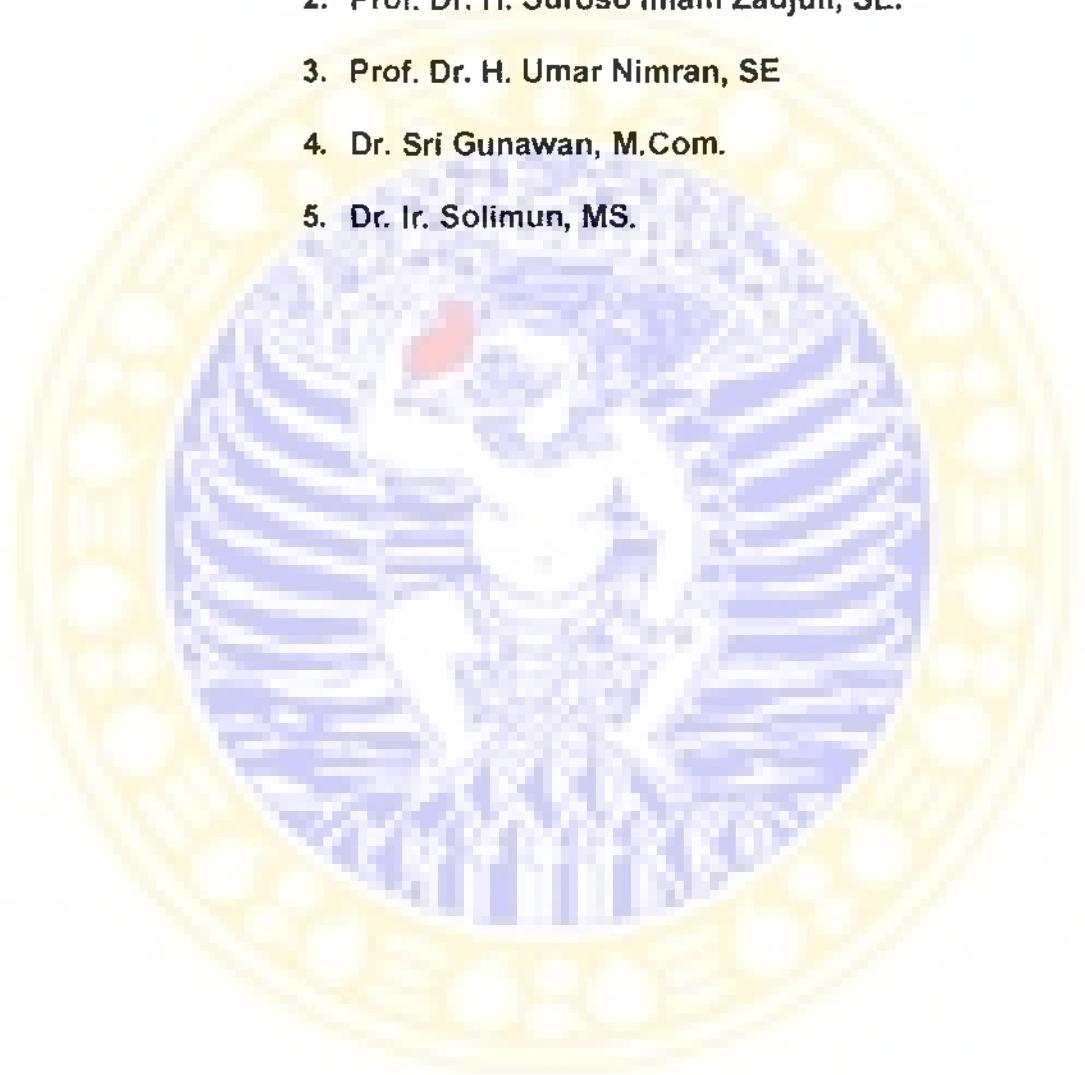
**ANGGOTA : 1. Prof. Dr. Soejono Abipraja, SE.**

**2. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE.**

**3. Prof. Dr. H. Umar Nimran, SE**

**4. Dr. Sri Gunawan, M.Com.**

**5. Dr. Ir. Solimun, MS.**





UCAPAN TERIMA KASIH

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia serta hidayah Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **"Pengaruh Peruntukan Lahan Pemukiman Terhadap Pembentukan Nilai Tambah Dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Kota Palembang Sumatera Selatan"**.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat dorongan, bimbingan dan sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga Prof Dr.med. H. Puruhito, dr. dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof Dr H Muhammad Amin serta Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Airlangga Dr. Sri Gunawan, M.Com yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk mengikuti pendidikan, serta banyak membantu dan memberi dukungan hingga selesainya penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE selaku pembimbing ketua dan Dr. Solimun, Ir. MS sebagai anggota pembimbing, yang dengan sabar memberikan koreksi dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Effendie, SE; Prof. Dr. H. MS Idrus, SE, Mec; dan Dr. Sri Gunawan, M.Com yang telah banyak membantu meberikan koreksi dan arahan dan sebagai anggota tim penguji tesis ini.
4. Bapak Drs. H. Nazief Soesila Dharma, mantan Walikota Batam dan Bapak Drs. H. Nyat Kadir selaku Walikota Batam serta Bapak H. Ismet Abdullah

selaku Ketua Otorita Batam yang telah banyak memberikan perhatian dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

5. Bapak Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, Msc.,Ph.D. Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah memberi izin belajar dan memberi dukungan hingga selesainya studi ini.
6. Orang tua tercinta H. Abdullah Adjhary dan Hj. Siti Ramlah Bahroen yang dengan sabar dan ikhlas memberikan dorongan dan selalu mendo'akan.
7. Istri tercinta yang tegar dan sabar Ir. Hj. Juliwati dan anak-anak tersayang Annisa Chairuna dan Jubah Maulana yang selalu memberikan do'a dan dorongan semangat serta pengorbanan yang tinggi nilainya.
8. Para Dosen dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah berjasa dan tidak mungkin dapat penulis lupakan.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan semua pihak terutama Dr. Dedi Rianto Rahadi, Drs.Anton, M.Si., Sdr. Budi Raharjo, SP. yang telah banyak membantu hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis selalu berdo'a semoga amal baik yang ikhlas akan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.



RINGKASAN

## RINGKASAN

### Pengaruh Peruntukan Lahan Pemukiman Terhadap Pembentukan Nilai Tambah dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Kota Palembang Sumatera Selatan.

**Bahrunsyah**

Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan merupakan kota tertua di Indonesia. Sebagai kota tua dengan sejarah peradaban yang panjang dengan berbagai masa keemasan, seperti masa kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam, Palembang sudah sejak lama terkenal secara nasional dan internasional sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan yang secara terus-menerus berkembang.

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis pengaruh peruntukan lahan pemukiman di Kota Palembang terhadap pembentukan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sektoral, serta untuk menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap pembentukan pendapatan sektoral di Kota Palembang.

Variabel yang digunakan yaitu Variabel Independen : Peruntukan Lahan Pemukiman (X), Variabel Intervening : Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral, dan Variabel Dependen : Pembentukan Pendapatan Sektoral. Data yang digunakan adalah data sekunder, secara series dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Metode analisis data yang digunakan Analisis faktor dan Analisis Path.

Hasil studi : **Pertama**, Peruntukan lahan pemukiman berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, karena peruntukan lahan untuk pemukiman hanya akan memacu salah satu sektor saja yaitu bangunan (kelompok sektor sekunder) maka tenaga kerja yang terserap hanya di bidang bangunan; begitu juga di perkotaan pada umumnya pemukiman yang terbangun kelas menengah kebawah maka tidak memacu pertumbuhan industri dan perdagangan (kelompok sektor sekunder lainnya) sehingga tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja (penyerapan tenaga kerja rendah), begitu juga dengan sektor jasa (kelompok sektor tersier) juga rendah dalam penyerapan tenaga kerja. Disamping itu pemukiman di luar kota akan mendesak sektor pertanian (kelompok sektor Primer) karena penambahan pemukiman akan mengurangi lahan pertanian yang mengakibatkan penyerapan tenaga di sektor pertanian juga berkurang. **Kedua**, Peruntukan lahan pemukiman berpengaruh nonsignifikan terhadap pembentukan pendapatan (nilai tambah) sektoral. Hal ini dapat terjadi karena pembangunan pemukiman ( salah satu sektor bangunan) di Kota Palembang memberikan kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan PDRB dimana sektor bangunan dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2003 hanya memberikan kontribusi pertumbuhan PDRB yang sangat kecil yaitu dibawah 5 (lima) persen sebagai akibat rendahnya penyerapan tenaga kerja. **Ketiga**, Penyerapan tenaga kerja sektoral berpengaruh nonsignifikan terhadap pembentukan pendapatan (nilai tambah) sektoral. Hal ini dapat terjadi karena belum siapnya tenaga kerja sektoral menghadapi perubahan dan rendahnya skill (tenaga trampil) dari tenaga kerja yang ada. Kondisi ini mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sektoral tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah sektoral.

Berdasarkan hasil studi disarankan kepada pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta : **Pertama**, Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan secara makro termasuk pengembangan wilayah untuk pemukiman sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. **Kedua**, Pemerintah sebaiknya menyiapkan dan merumuskan konsep pembangunan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas serta menyiapkan tenaga kerja yang terampil, mandiri dan mampu untuk melakukan perubahan. **Ketiga**, Penyiapan peruntukan lahan untuk pemukiman sebaiknya didahului dengan menyiapkan sarana dan prasarana serta keamanan yang kondusif. **Keempat**, Tenaga kerja di Palembang agar lebih meningkatkan keterampilannya untuk dapat bersaing dalam merebutkan peluang yang ada. **Kelima**, Agar pihak swasta dan masyarakat lebih berperan aktif dalam mengembangkan/meningkatkan fasilitas pendidikan baik yang formal maupun non formal dan informal untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang ada di Palembang agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar Palembang.





SUMMARY

## SUMMARY

### **Effect of the Settlement Land Use on the Sectoral Income Establishment and the Sectoral Employment in Palembang City, South Sumatra**

**Bahrunsyah**

Palembang City as the provincial capital of South Sumatra is the oldest city throughout Indonesia. As the oldest city with the long history of well-known civilization having reached several golden ages, particularly those of Sriwijaya Kingdom and Palembang Darussalam Sultanate, Palembang has been long recognized both nationwide and worldwide as the centers for administration, trading and education that has been developing consistently.

The objective of the recent research was to analyze and effect of the settlement land use in Palembang city on the income establishment and sectoral employment, and an effect of the sectoral employment on the sectoral income establishment in Palembang City.

Some variables used here were including an independent variable of the settlement land use (  $X$  ), an intervening variable made of the sectoral employment, and a dependent variable of sectoral income establishment. The data collected were series secondary data commencing from 1999 up to 2003. The data were analyzed using factor analysis method and path analysis.

The results showed that, first, the land use brought about a negative significant effect on the sectoral employment. Since the land use for settlement only stimulated one the sectors notably the building construction (secondary sector group), then the employment existed only in that building construction sector. Similarly, in urban areas, given that the settlement was usually developed for middle and lower classes, then such development didn't produce a growth of industry and commerce (other secondary sector group). The subsequent consequent was that such development didn't have a significant effect on the increased employment (employment for lower income group). In addition, the

service sector (tertiary sector group) also generated a low employment. The sub urban settlement would shift the agricultural sector (primary sector group) since a considerable increase in population would reduce the agricultural land where the resulting impact was that the employment in agricultural sector also decreased. Second, the land use for settlement was not significantly correlated with the income formation factor (sectoral value added). This might be the case since the settlement development (one of the building construction sectors) in Palembang City provided a minor contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in which the building construction sector within 1999 – 2003 period only provided a small growth of GRDP less than 5 percent as the result of the decline in employment. Third, the sectoral employment was not significantly related to the sectoral income establishment (value added). This might occur because of inadequate preparedness of the sectoral workers in dealing with the changing world and of the low skills from the existing workers. This condition caused the sectoral employment having no significant impact on the improved sectoral value added.

Regarding those results, several suggestions were made for the regional government. First, the regional government should prepare a macro planning, including the development of region for settlement in accordance with each region. Second, the government should develop and formulate a concept of the high qualified human resources and should develop the skilled worker having adequate capability in coping with the changing world. Third, a preparation of superstructure as well as conducive security. Fourth, the workers in Palembang City should improve their skills for competing with the existing opportunities. Fifth, the private sector and community should be actively engaged in developing and increasing educational facilities both formal and informal in nature in the view of creating the qualified human resources present in Palembang so that they will win in competing with workers outside Palembang.



## ABSTRACT

## ABSTRACT

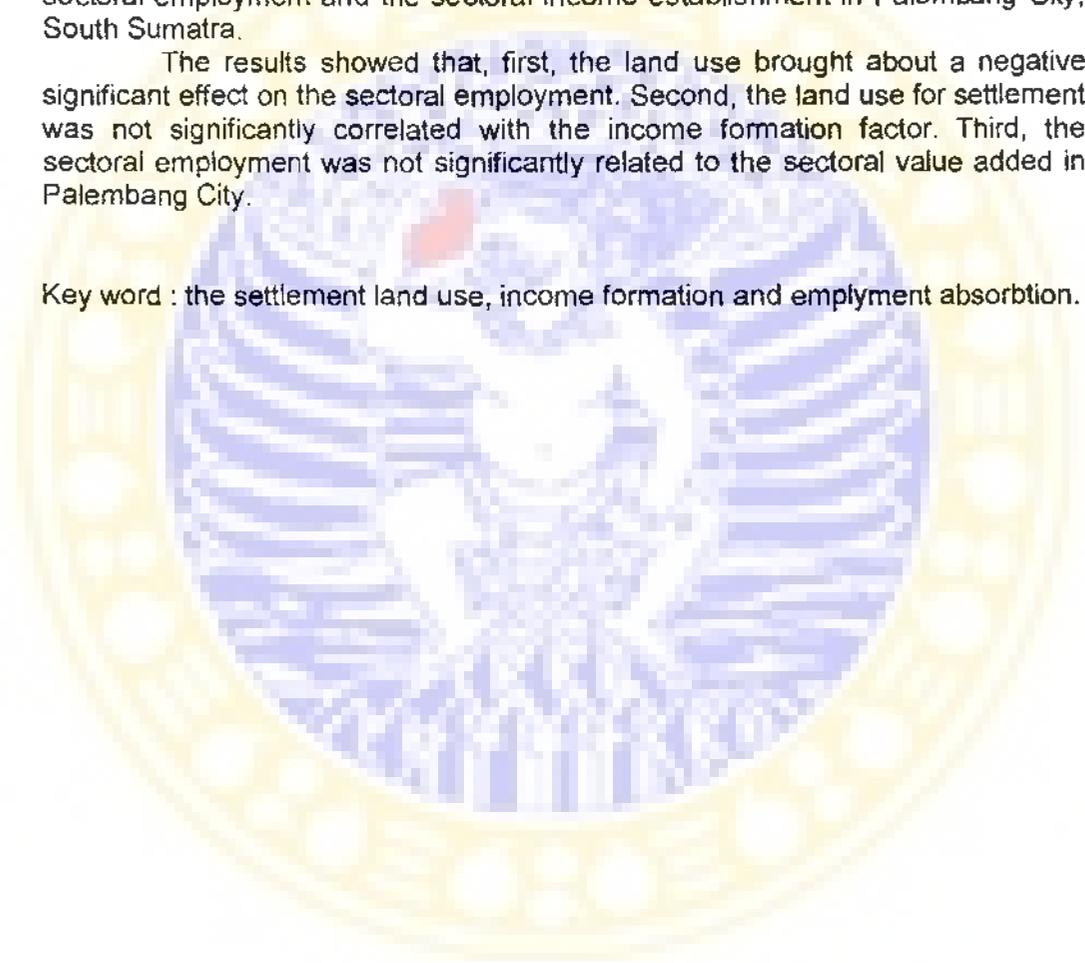
### **Effect of the Settlement Land Use on the Sectoral Income Establishment and the Sectoral Employment in Palembang City, South Sumatra**

The objective of the recent study was to analyze an effect of the settlement land use in Palembang City on the sectoral income establishment and sectoral employment, and an effect of the sectoral employment on the sectoral income establishment in Palembang City.

This was an explanatory research, a type of study that tried to explain a relationship among variables and then test some hypotheses formulated before. The hypotheses tested here were the relationship between the land use and sectoral employment and the sectoral income establishment in Palembang City, South Sumatra.

The results showed that, first, the land use brought about a negative significant effect on the sectoral employment. Second, the land use for settlement was not significantly correlated with the income formation factor. Third, the sectoral employment was not significantly related to the sectoral value added in Palembang City.

Key word : the settlement land use, income formation and employment absorbtion.





## DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Prasyarat Gelar .....	iii
Persetujuan .....	iv
Penetapan Panitia .....	v
Ucapan Terima Kasih .....	vi
Ringkasan .....	viii
Summary .....	x
Abstact .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Studi ... ..	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Kedudukan Perencanaan Sektoral dalam Perencanaan Wilayah .....	12
2.2. Relevansi Perencanaan Sektoral terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial .....	13
2.3. Pembangunan Berkelanjutan sebagai Konsep Penting Pembangunan Wilayah .....	17
2.4. Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Wilayah..	22
2.5. Beberapa Teori Dalam Pembangunan Wilayah .....	27

<b>BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	<b>37</b>
3.1. Kerangka Proses Berpikir .....	37
3.2. Kerangka Konseptual .....	38
3.3. Hipotesis Penelitian .....	38
<b>BAB 4. METODE PENELITIAN</b>	<b>39</b>
4.1. Rancangan Penelitian .....	39
4.2. Populasi dan Sampel .....	39
4.3. Variabel Penelitian .....	39
4.4. Metode Pengumpulan Data.....	40
4.5. Analisis Data .....	40
<b>BAB 5. ANALISIS HASIL STUDI</b>	<b>47</b>
5.1. Kondisi Kota Palembang .....	47
5.2. Hasil Analisis Deskriptif .....	48
5.3. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori .....	51
5.4. Hasil Pemeriksaan Asumsi Analisis Jalur .....	52
5.5. Hasil Analisis Jalur : Pengujian Hipotesis Penelitian.	54
<b>BAB 6. PEMBAHASAN</b>	<b>56</b>
6.1. Pengaruh Peruntukan Lahan Pemukiman Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral .....	56
6.2. Pengaruh Peruntukan Lahan Pemukiman Terhadap Pembentukan Nilai Tambah Sektoral .....	58
6.3. Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pembentukan Nilai Tambah Sektoral .....	60
<b>BAB 7. PENUTUP</b>	<b>63</b>
7.1. Kesimpulan .....	63
7.2. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



**DAFTAR TABEL**

## DAFTAR TABEL

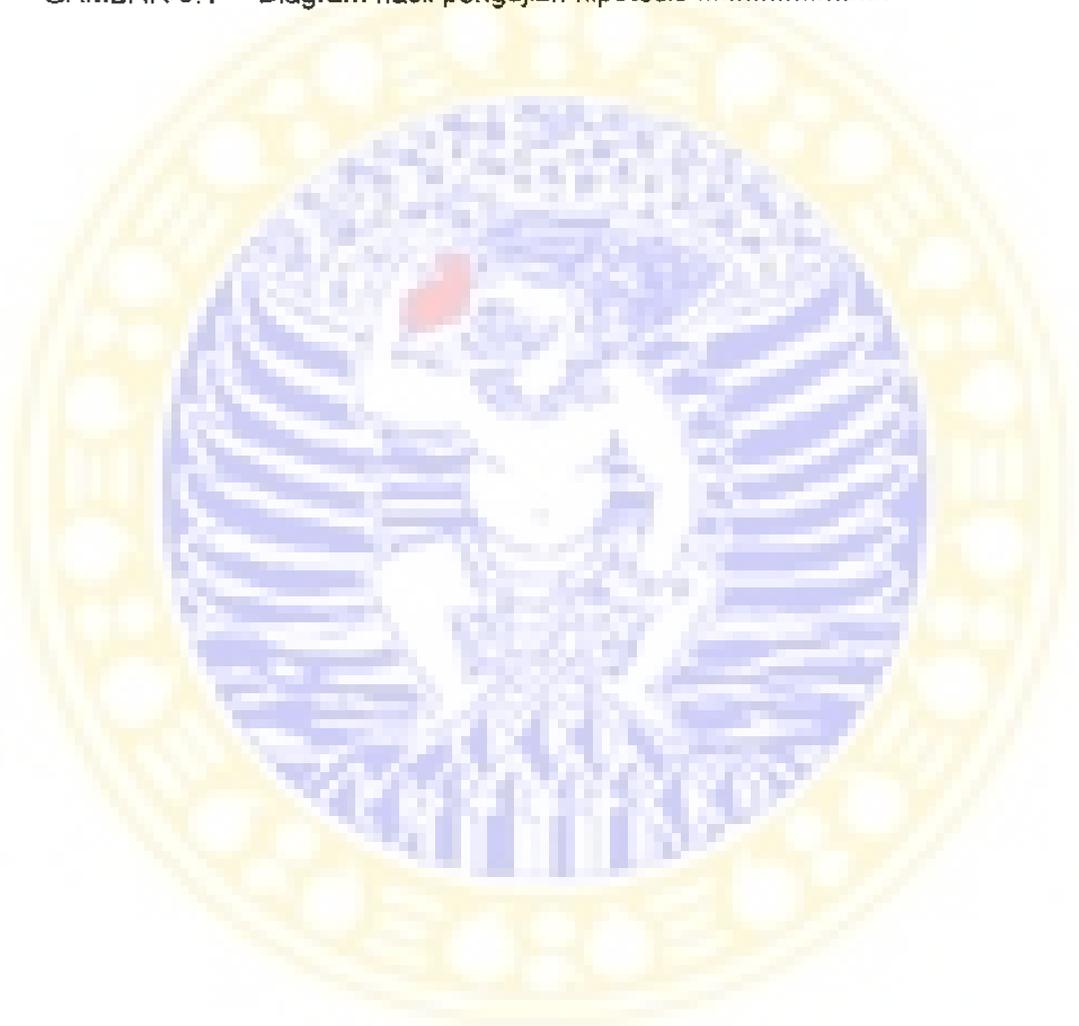
		<b>Halaman</b>
TABEL 5.1	Hasil Analisis Deskriptif PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dalam Kurun Waktu 1999 - 2003.....	48
TABEL 5.2	Hasil Analisis Deskriptif PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam Kurun Waktu 1999 - 2003.....	49
TABEL 5.3	Kondisi Peruntukan Lahan Pemukiman dalam Kurun Waktu 1999 – 2003 .....	50
TABEL 5.4	Hasil analisis Deskriptif Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral dalam Kurun Waktu 1999 – 2003 .....	50
TABEL 5.5	Loading Factor Indikator dari Variabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku .....	51
TABEL 5.6	Loading Factor Indikator dari Variabel Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Kota Palembang.....	52
TABEL 5.7	Pengujian Asumsi Linieritas .....	53



## DAFTAR GAMBAR

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
GAMBAR 3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	37
GAMBAR 3.2 Kerangka Konseptual .....	38
GAMBAR 4.1 Diagram Path hubungan antar variabel secara teoritis .....	43
GAMBAR 5.1 Diagram hasil pengujian hipotesis .....	54

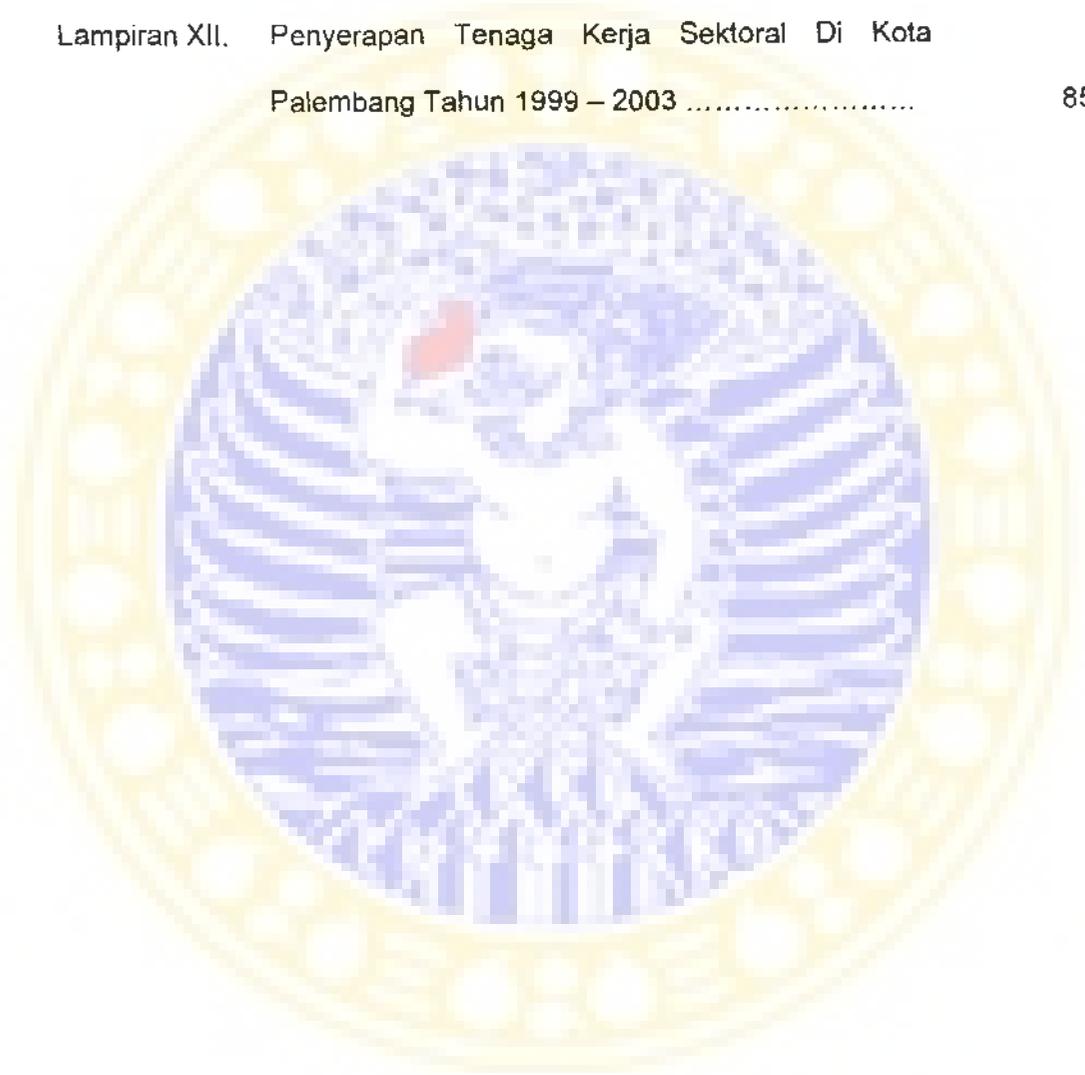


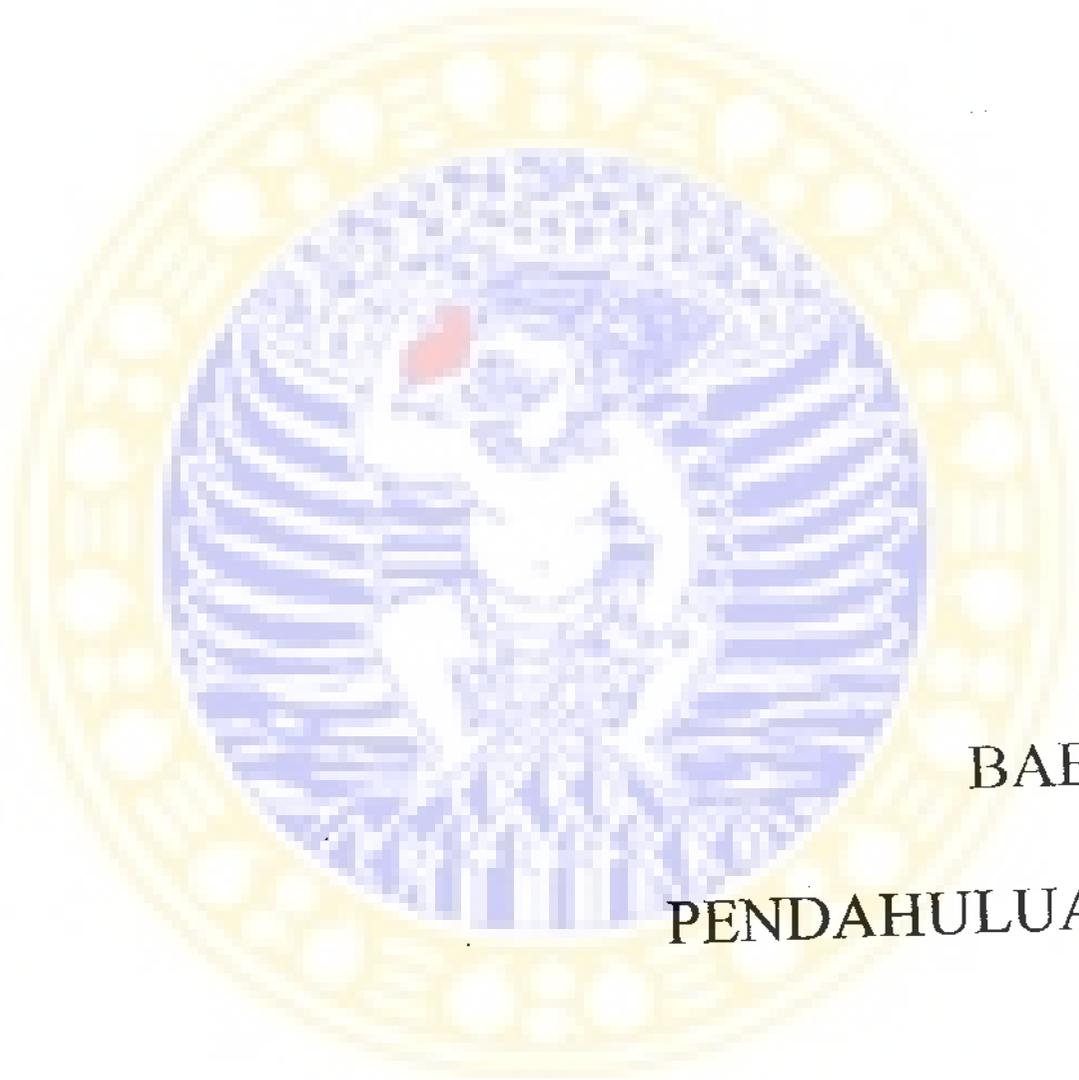


**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
Lampiran I. Hasil Analisis Deskriptif .....	68
Lampiran II. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori .....	70
Lampiran III. Hasil Pengujian Asumsi Linieritas .....	72
Lampiran IV. Hasil-Hasil Analisis Path .....	74
Lampiran V. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha Tahun 1999 – 2003 (Juta rupiah) .....	78
Lampiran VI. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 1999 – 2003 (Juta rupiah) .....	79
Lampiran VII. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 1993 – 2003 (Juta rupiah) .....	80
Lampiran VIII. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha Tahun 1993 – 2003 (Juta rupiah) .....	81
Lampiran IX. Jumlah, Distribusi dan Perkembangan produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku periode Tahun 1993 – 2003 (milyar rupiah) .....	82

Lampiran X. Jumlah, Distribusi dan Perkembangan produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 periode Tahun 1993 – 2003 (milyar rupiah) .....	83
Lampiran XI. Peruntukan Lahan Kota Palembang Tahun 1999 – 2003.....	84
Lampiran XII. Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Kota Palembang Tahun 1999 – 2003 .....	85





**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Lokasi lahan yang memiliki aksesibilitas paling tinggi terhadap kegiatan ekonomi biasanya memiliki harga yang paling tinggi pula. Harga lahan di wilayah pusat kota biasanya berada pada tingkat yang tertinggi. Semakin jauh letak lahan dari pusat kota, maka harga lahan berangsur-angsur turun. Di pusat kota, orientasi pemanfaatan lahan lebih bersifat ekonomis. Semakin jauh dari pusat kota, seiring dengan penurunan harga lahan maka menurun pula intensitas dan sifat ekonomis pemanfaatan lahan (Suparmoko, 1997: 176 – 177).

Sejalan dengan penambahan penduduk dan meningkatnya laju pembangunan, masyarakat perkotaan menuntut penyediaan fasilitas sosial yang memadai dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lain untuk dapat mewujudkan kehidupan dan penghidupan kota yang terpadu.

Jumlah penduduk yang makin bertambah di daerah perkotaan, mengharuskan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan penataan pertanahan untuk maksud:

1. Pengadaan atau perolehan lahan dalam pengertian "*land acquisition*" guna menyediakan ruang yang diperlukan bagi perluasan perumahan dan pemukiman penduduk yang jumlahnya makin bertambah.
2. Pengadaan atau perolehan lahan bagi pengembangan kegiatan perekonomian, baik di bidang industri maupun jasa, untuk memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi angkatan kerja baru yang jumlahnya makin bertambah.



3. Pengadaan atau perolehan lahan untuk pembangunan prasarana transportasi, komunikasi, air bersih, listrik, *drainase*, *engineering*, pengolahan limbah, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian terhadap nilai lahan juga dibedakan antara lahan yang diusahakan (*improved land*) dan lahan yang tidak diusahakan (*unimproved land*).

Sejarah menunjukkan bahwa urbanisasi dan industrialisasi selalu merupakan fenomena yang berjalan secara paralel. Pengalaman empiris dari negara-negara industri maju telah membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Pertambahan penduduk yang terjadi sebagai akibat dari laju industrialisasi ini pada gilirannya akan mengakibatkan pertumbuhan kota yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan lahan di perkotaan terutama lahan pemukiman.

Perbedaan kota-kota besar pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang adalah: jumlah penduduk, tingkat pendapatan per kapita, tingkat kecanggihan teknologi, serta tata nilai/perilaku masyarakat yang semakin bersifat universal. Aspek terakhir yaitu tata nilai / perilaku, sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Keempat aspek tersebut merupakan basis yang mendasari bentuk sisi permintaan (*demand side*) yang harus diakomodasikan oleh kota. Sisi permintaan ini berkait erat dengan kebutuhan akan lahan dan tingkat intensitas pemanfaatannya, serta berbagai bentuk infrastruktur sosial yang tersedia akan berkait pula dengan perilaku masyarakat.

Kebutuhan akan lahan tidak lagi hanya didasarkan kepada luasnya, tetapi juga didasarkan pada tingkat optimalisasi pemanfaatannya serta sifat penggunaannya. Sebagai ilustrasi, peruntukan lahan yang bersifat tunggal (*mono use*) sudah mulai ditinggalkan, sedang kecenderungan pemanfaatan lahan dengan fungsi majemuk (*multi use*) secara terpadu dan berskala besar (misalnya, konsep *superblok*) mulai berkembang dengan pesat. Namun, harus

disadari bahwa sisi permintaan yang dikendalikan kekuatan pasar ini tidak boleh dilepas tanpa kendali. Kota bukan sekedar mesin ekonomi, tetapi kota juga merupakan wujud organisasi sosial-budaya masyarakat yang harus dijaga keseimbangan, keadilan serta kesinambungan eksistensinya. Jelas di sini, selain pertumbuhan yang bersifat fisik (*growth*), berlangsung juga proses perubahan dalam masyarakat (perilaku) yang memang merupakan bagian dari proses evaluasi peradaban manusia (*social changes*).

Dengan persediaan lahan yang semakin terbatas, maka gejala kenaikan harga lahan tak terhindarkan lagi. Lahan telah menjadi suatu komoditas yang nilainya ditentukan oleh kekuatan pasar. Kenyataan tersebut saat ini dihadapi oleh banyak kota besar di dunia, termasuk juga kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.

Di wilayah perkotaan, lahan akan lebih bernilai apabila di atasnya berdiri suatu *bangunan*. Disamping itu, hampir semua produksi barang dan jasa selain memerlukan faktor produksi seperti kapital, tenaga kerja, dan teknologi, juga memerlukan lahan sebagai lokasi yang diorganisasikan dengan seluruh sumberdaya dalam proses produksi.

Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu kota tertua di Indonesia dengan sejarah peradaban yang panjang dengan berbagai masa keemasan, seperti kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam, dan sangat dikenal baik di lingkup nasional maupun internasional sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan yang terus-menerus berkembang.

Palembang sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa dan pengolahan industri, secara geografis sangat strategis karena terletak pada kawasan segitiga perdagangan ASEAN (Indonesia, Malaysia dan Singapura).

Kondisi ini didukung pula oleh posisi kota yang dibelah oleh Sungai Musi yang mengalir serta bermuara ke Selat Malaka serta keberadaan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan kualitas yang terus ditingkatkan, sehingga memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang tinggi bagi lalu lintas barang dan jasa dari dan ke Kota Palembang, baik sebagai kota perdagangan maupun sebagai pusat pengolahan produk.

Sebagai ibukota provinsi yang terus berkembang, kebutuhan akan lahan terutama untuk areal perumahan dan industri semakin hari semakin meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh munculnya kawasan perekonomian baru.

Dari sisi ekonomi makro, sebagai pusat industri pengolahan minyak dan gas, perdagangan, pengangkutan dan jasa, perkembangan Kota Palembang dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Dalam rangka mendorong dan memacu kegiatan investasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang optimal, pembangunan Kota Palembang harus mengacu pada daya dukung dan potensi yang tersedia serta strategi dan kebijakan pembangunan kota yang memadai terutama dalam rangka otonomi daerah. Hal ini sangat penting mengingat besarnya berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kota Palembang di masa depan, seperti zona perdagangan bebas, perkembangan ekonomi global termasuk perkembangan ilmu dan teknologi serta persaingan dalam konteks nasional, regional maupun internasional.

Kota Palembang yang baru saja sukses sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XVI memiliki luas wilayah 37.403 Ha. Berdasarkan penggunaannya, tanah di kota Palembang dibedakan atas wilayah yang sudah terbangun dan wilayah yang belum terbangun. Di antara wilayah yang sudah terbangun, dipergunakan untuk

permukiman, kawasan perdagangan dan industri mencapai 44,11 persen, sedangkan wilayah yang belum terbangun, berupa persawahan mencapai 13,34 persen; perairan dan rawa 25,20 persen; kebun campuran dan tegalan 11,34 persen; tanah terbuka 2,35 persen; hutan 0,6 persen dan sisanya untuk jalan, dan jalur hijau (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 2003).

Salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (wilayah). Pencapaian sasaran di atas bukanlah pekerjaan yang ringan, karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki. Sementara itu, baik potensi ekonomi maupun karakteristik yang dimiliki suatu daerah pada umumnya berbeda dengan yang dimiliki oleh daerah lain.

Dari pemikiran ini maka persoalan utama yang akhir-akhir ini sering dibahas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu untuk menjalin keserasian dan keterpaduan pembangunan nasional perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah (regional).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, baik atas dasar harga berlaku (PDB Riel) maupun atas dasar harga konstan (PDB Konstan). Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kelompok lapangan usaha yaitu (1) Kelompok lapangan usaha primer yaitu pertanian, (2) Kelompok sekunder terdiri dari sektor pertambangan dan galian; Industri pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih, dan (3) Kelompok tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan

restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa pemerintah dan swasta.

Produk Domestik Bruto Indonesia atas dasar harga berlaku untuk sektor primer tahun 1993 sebesar Rp 58.963,4 milyar dan tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 296.237,6 milyar atau rata-rata tiap tahun meningkat sebesar 17,52 %. Sektor sekunder tahun 1993 sebesar Rp. 130.856,9 milyar dan tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 778.412,9 milyar atau rata-rata tiap tahun meningkat 19,52 %. Sektor tersier tahun 1993 sebesar Rp 139.955,8 milyar dan tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 712.040,4 milyar atau rata-rata tiap tahun meningkat 17,67 % (BPS: PDB Nasional Tahun 1993 dan Tahun 2003).

Secara keseluruhan Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 1993 sebesar Rp 329.776,1 milyar dan tahun 2003 meningkat menjadi Rp 1.786.690,9 milyar atau rata-rata tiap tahun meningkat 18,41 %.

Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 1993, dalam periode yang sama untuk tahun 1993 Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar Rp 329.776,1 milyar meningkat menjadi sebesar Rp 444.453,5 milyar pada tahun 2003 atau rata-rata tiap tahun meningkat 3,03 %, dimana untuk sektor primer pada tahun 1993 sebesar Rp 58.963,4 milyar dan tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 70.374,4 milyar atau rata-rata tiap tahun telah meningkat 1,78 %. Sektor sekunder pada tahun 1993 sebesar Rp 130.896,9 milyar dan tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 191.739,9 milyar atau rata-rata tiap tahun meningkat 3,89 %. Sedangkan untuk sektor tersier pada tahun 1993 sebesar Rp 139.955,8 milyar dan pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 182.339,2 milyar atau rata-rata tiap tahun meningkat 2,68 %. Pertumbuhan dan distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia periode tahun 1993 sampai

dengan tahun 2003 dapat dilihat pada Lampiran IX dan X (BPS: PDB Nasional Tahun 1993 dan Tahun 2003).

Dalam periode 1993 – 2003 (10 tahun terakhir) pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku rata-rata tiap tahun meningkat 17,52 %, dimana pada tahun 1993 sebesar Rp 10.692.835 juta dan tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 54.748.216 juta. Untuk sektor primer tahun 1993 sebesar Rp 2.048.038 juta dan tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 8.992.370 juta atau rata-rata tiap tahun 15,95 %. Sektor sekunder tahun 1993 sebesar Rp. 4.488.832 juta dan tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 26.635.318 juta atau rata-rata tiap tahun meningkat 19,49 %. Sektor tersier tahun 1993 sebesar Rp 4.355.965 juta dan tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 19.120.528 juta atau rata-rata tiap tahun meningkat 15,94 % (BPS : PDRB Propinsi Sumatera Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2003).

Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 1993 dalam periode yang sama untuk tahun 1993, PDRB Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 10.892.835 juta dan pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 13.352.812 juta atau rata-rata tiap tahun meningkat 2,06 %. Untuk sektor primer pada tahun 1993 sebesar Rp 2.048.038 juta dan pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp. 2.761.666 juta atau rata-rata tiap tahun meningkat 3,03 %. Untuk sektor sekunder pada tahun 1993 sebesar Rp 4.488.832 juta dan pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 5.798.437 juta atau rata-rata tiap tahun meningkat 2,59 %. Sedangkan untuk sektor tersier pada tahun 1993 sebesar Rp 4.355.965 juta dan pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp 4.792.709 juta atau rata-rata tiap tahun meningkat 0,96 %. Pertumbuhan dan distribusi PDRB Provinsi Sumatera selatan periode tahun 1993 sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat pada Lampiran VII

dan VIII (BPS : PDRB Propinsi Sumatera Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2003).

Meskipun antara pendekatan sektoral dan regional tidak dapat dikatakan bahwa yang satu lebih baik dari yang lainnya, namun kalau dilihat tingkat perkembangan ekonomi serta karakteristik yang ada pada tiap-tiap daerah, maka pendekatan regional adalah pilihan yang tepat dalam perencanaan sekarang ini. Upaya pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini bagaimanapun tidak terlepas dari pertimbangan aspek spasial.

Bagi suatu negara yang mempunyai wilayah sangat luas dengan latar belakang sejarah dan konfigurasi geografis seperti Indonesia adalah suatu hal yang wajar apabila masih dijumpai ketimpangan pembangunan antar daerah. Ada beberapa daerah pada saat ini telah lebih dahulu maju dan ada beberapa daerah lainnya yang belum berkembang. Selain dari perbedaan di bidang potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka perbedaan dalam struktur industri/sektor ekonomi akan berdampak pula pada perbedaan pertumbuhan hasil produksi dan kesempatan kerja.

Berkaitan dengan peningkatan arus pembangunan, maka interaksi yang terbentuk di antara unsur-unsur pembangunan, lazimnya akan cenderung mengarah pada dua pola pendekatan metodologis yang sangat berbeda; mengadaptasi model ekonomi makro yang digunakan dalam teori pertumbuhan agregatif (dan varian-varian regional khusus seperti teori *export base*) atau menafsirkan pertumbuhan suatu daerah menurut pendekatan dinamika struktur industri (Ricardson, 1977).

Perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan nasional dan analisis pertumbuhan daerah dititikberatkan pada perpindahan faktor (*Factor Movements*). Seringkali diasumsikan, walaupun tidak seluruhnya, bahwa sesuatu bangsa menganut suatu perekonomian tertutup. Asumsi ini tidak dapat

diterapkan untuk daerah, karena peluang untuk terjadinya perpindahan tenaga kerja dan modal sangat besar bagi perbedaan tingkat pertumbuhan daerah (regional). Dalam hal ini terdapat dua perbedaan metodologis yaitu *export base*, dengan *Industrial Structure*, dimana kedua pendekatan ini adalah komplementer satu dengan yang lainnya (Ricardson, 1977). Cara pendekatan struktur industri adalah cara pendekatan yang menganalisis berubahnya pola pertumbuhan regional sebagai efek dari keputusan-keputusan lokasi dan *output* yang diambil oleh perusahaan-perusahaan bisnis sebagai reaksi terhadap perubahan-perubahan kebutuhan *input* dan pasar dalam industri-industri mereka. (saluran *input-output*) dan arus faktor produksi merupakan variabel yang relevan dalam keputusan-keputusan tersebut, dalam hal kaitan dengan penelitian ini arus faktor yang dimaksudkan adalah kebutuhan akan areal (kawasan untuk membangun industri mereka) yang dekat dengan sumber *input* (sumber alam) dan dengan pasar. Sehingga subjek penelitian ini adalah untuk meneliti variabel dari beberapa faktor (kebijakan peruntukan lahan bagi kebutuhan pembangunan meliputi pertanian, industri, pemukiman, sarana dan prasarana) dan kaitannya dengan *output* pembangunan (dalam hal ini tingkat kinerja pembangunan yang diukur dengan peningkatan PDRB daerah yang menjadi objek penelitian) dan penyerapan tenaga kerja sektoral.

Dari uraian latar belakang tersebut, dalam studi ini disusun judul tesis "***Pengaruh Peruntukan Lahan Pemukiman Terhadap Pembentukan Nilai Tambah Dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Kota Palembang Sumatera Selatan***"

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tesis tersebut disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah peruntukan lahan pemukiman berpengaruh signifikan terhadap pembentukan nilai tambah di Kota Palembang ?
2. Apakah peruntukan lahan pemukiman berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Kota Palembang ?
3. Apakah penyerapan tenaga kerja sektoral berpengaruh signifikan terhadap pembentukan nilai tambah masyarakat di Kota Palembang ?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Studi**

#### **1.3.1. Tujuan Studi**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, disusun tujuan studi sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh peruntukan lahan pemukiman terhadap pembentukan nilai tambah di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis pengaruh peruntukan lahan pemukiman terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Kota Palembang .
3. Untuk menganalisis pengaruh pembentukan nilai tambah terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Kota Palembang.

#### **1.3.2. Manfaat Studi**

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Program Pendidikan S2 Ilmu Manajemen pada Program Magister Pascasarjana Universitas Airlangga, studi ini juga bertujuan untuk :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Palembang khususnya Kantor Pertanahan Kota Palembang, Dinas Tata Kota , Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang tentang strategi yang akan diambil dalam menetapkan kebijakan yang akan diterapkan pada peraturan

pengelolaan dan peruntukan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sehingga peruntukan dan pemanfaatan lahan lebih efisien.

2. Dengan pemanfaatan lahan yang efisien diharapkan masyarakat akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dengan peruntukan lahan yang terencana, maka tata letak bangunan yang sudah terlanjur tidak teratur selama ini akan mudah untuk dilakukan penataan dengan pola konsolidasi tanah perkotaan.
4. Memberikan ide kepada peneliti lain agar memperhatikan fungsi lahan terhadap penyerapan tenaga kerja.



## BAB 2

# TINJAUAN PUSTAKA

## BAB 2

## TINJAUAN PUSTAKA



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

### 2.1. Kedudukan Perencanaan Sektoral dalam Perencanaan Wilayah.

Perencanaan wilayah memiliki dimensi dan cakupan yang luas. Secara substantif, perencanaan ini tidak hanya melihat pada dimensi spasial atau keruangan yang merupakan media interaksi berbagai unsur wilayah. Tetapi mengingat totalitas cakupannya atas suatu wilayah tertentu, maka ia juga meliputi perencanaan tentang aktifitas manusia yang membangun atau menghidupkan dinamika wilayah. Aktifitas manusia dalam membangun atau menghidupkan dinamika wilayah secara umum tersebar pada sektor-sektor terkait, seperti pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, jasa dan lain sebagainya. Dengan menggunakan cara pandang biologi, maka perencanaan wilayah merupakan genus, maka perencanaan sektoral dan perencanaan spasial merupakan spesiesnya.

Pada aplikasinya, perencanaan sektoral di Indonesia pada era orde baru merupakan *mainstream* yang mengatur proses perencanaan pembangunan secara umum. Pengejawantahan dominasi orientasi sektoral pada perencanaan pembangunan atau perencanaan wilayah dapat dilihat pada peran dominan dari departemen sektoral, mulai dari proses inisiatif hingga proses penetapan akhir dokumen perencanaan. Meskipun secara formal, proses pengisian rencana sektoral juga mulai dari bawah, seperti tahapan musbang hingga rakorbang, namun demikian tekanan dari atas jauh lebih kuat dalam menentukan materi akhir dari perencanaan yang disusun. Ini menunjukkan pola *top-down* dari perencanaan pembangunan jauh lebih berperan ketimbang *bottom-up*. Lebih dipilihnya pendekatan perencanaan sektoral oleh pusat dapat dipahami,

mengingat bahwa model perencanaan ini tidak terlalu membutuhkan detail wilayah dari target implementasi rencana. Dengan pendekatan sektoral, maka cukup dengan menyandarkan diri pada data statistik yang bersifat makro nasional, pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh departemen terkait, telah dapat menyusun rencana kegiatan sektoral yang akan dilaksanakan.

## **2.2. Relevansi Perencanaan Sektoral terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.**

Apabila perencanaan spasial diarahkan pada penciptaan tingkat efisiensi dan efektifitas maksimal pemanfaatan ruang, dengan mengingat faktor konstrain, yaitu luasan lahan yang relatif konstan, maka perencanaan sektoral dimaksudkan untuk mendorong kemajuan dinamika sektoral sehingga menghasilkan *output* yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan di sisi lain adalah untuk mempertahankan keberlanjutan proses pembangunan yang berlangsung (Todaro, 1994).

Kemajuan hidup manusia pada dasarnya tidak dapat ditumpukan semata-mata pada satu sektor saja. Kehidupan manusia atau masyarakat melibatkan dimensi yang banyak, yang keseluruhannya saling berinteraksi untuk menciptakan tingkat keseimbangan optimal, sehingga mampu menyangga berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan khususnya dan taraf peradaban umumnya. Dalam perspektif perkembangan wilayah, adanya keterbatasan sumber daya, demikian pula karena pertimbangan efisiensi dan perbedaan tingkat keterampilan, tidak dapat dielakkan dapat mempengaruhi pilihan sektor yang akan dijadikan sebagai motor bagi pertumbuhan dan kemajuan wilayah. Teori sektor basis menjelaskan bahwa untuk terciptanya kemajuan ekonomi suatu wilayah, maka wilayah yang bersangkutan harus

mampu mengembangkan sektor unggulan yang terdapat di wilayah tersebut untuk menarik keuntungan dari pasar ekspor.

Teori sektor menjelaskan bahwa sektor kegiatan ekonomi adalah sekelompok kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa sejenis menurut sistem klasifikasi tertentu, misalnya seperti yang terdapat dalam *United States Standard Industrial Classification* (USSIC). Sistem klasifikasi mengorganisasi seluruh jenis industri berdasarkan produknya ke dalam asas yang semakin rinci, mulai dari sektor ekonomi yang umum (misalnya *manufacturing* atau jasa) ke segmen industri khusus (misalnya olahraga komersial, atau binatang). Sistem klasifikasi tidak hanya dihasilkan oleh sebuah negara, tetapi juga secara multilateral yang disusun oleh dan berlaku di negara-negara anggota *North American free Trade Agreement* (NAFTA). Pada umumnya urutan klasifikasi yang digunakan adalah pembagian sektor-sektor ekonomi menjadi beberapa sektor yaitu sektor pertanian (*agriculture*), pertambangan (*mining*), konstruksi (*construction*), transportasi dan fasilitas umum (*transportation and public utilites*), manufaktur (*manufacturing*), perdagangan besar (*whole sale*), perdagangan ritel (*retail trade*), keuangan, asuransi dan pengembang (*finance, insurance and real estate*), jasa-jasa (*services*) dan sektor yang tidak masuk dalam klasifikasi (*unclassified sector*).

Pembagian lain tentang sektor ekonomi adalah sebagaimana disebutkan di dalam Produk Domestik Regional Bruto, yang terdiri dari sembilan sektor yaitu pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan terakhir jasa-jasa. Sudut pandang lain yang melihat aktifitas ekonomi yang dilakukan dalam suatu wilayah adalah pembagian sektor menurut sifat kualitas *input*, pemrosesan,

keluaran dan legalitasnya, adalah pembagian kegiatan kedalam sektor primer, sekunder dan tersier, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1) Sektor Primer

Kegiatan ekonomi sektor primer adalah seluruh kegiatan ekonomi di bidang yang langsung berhubungan dengan atau bergantung pada hasil alam seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

2) Sektor Sekunder

Kegiatan ekonomi sektor sekunder adalah seluruh kegiatan ekonomi di bidang yang mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi, menjadi bahan jadi atau setengah jadi lainnya (sebagai bagian dari rantai produksi vertikal dan proses umum "roundbout production" ekonomi manufaktur yang spesialisasi dan pembagiannya semakin meningkat).

3) Sektor Tersier

Kegiatan ekonomi sektor tersier adalah seluruh kegiatan ekonomi di bidang pengorganisasian dan pengkoordinasian produksi dan kegiatan lain yang terkait, yang melakukan pertukaran (logistik, distribusi, pemasaran, dan lain-lain), perawatan (perbaikan, dan lain-lain) dan konsumsi (eceran, grosiran) barang dan jasa.

*Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar*

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam penghitungan ini digunakan tahun 1993. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS Sumsel, 2001).

Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara atau bagian wilayah suatu negara (provinsi, kabupaten/kota) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu produk domestik bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Sedangkan menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti: 1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 2) konsumsi pemerintah, 3) pembentukan modal tetap domestik bruto, 4) perubahan stok, dan 5) ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang

dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya (BPS Sumsel, 2001).

Kondisi perekonomian Indonesia selama lima tahun terakhir tampaknya masih belum stabil seperti saat sebelum krisis. Berbagai upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi terus dilakukan diantaranya dengan mengupayakan tingkat suku bunga yang wajar dan realistis, tingkat inflasi yang terkendali dan pengurangan defisit anggaran. Walaupun pemulihan ekonomi yang dicapai masih jauh dari harapan, namun berangsur-angsur gejala ke arah perbaikan mulai terasa sejak tahun 1999. Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat menuntut adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang secara makro berarti juga peningkatan pendapatan agregat masyarakat. Persyaratan ini menyebabkan perlunya diupayakan penciptaan lapangan kerja produktif regional.

Dalam kerangka peningkatan lapangan kerja produktif regional, maka mutlak disusun perencanaan sektoral yang akurat, dalam arti pemilihan sektor prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi wilayah. Demikian juga dalam konteks mendorong akselerasi perkembangan ekonomi wilayah, pemilihan sektor yang akan dikembangkan juga harus memperhitungkan potensinya untuk menciptakan aglomerasi dan intensitas keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya.

### **2.3. Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Konsep Penting Pembangunan Wilayah.**

Pengertian tentang berkelanjutan (*sustainability*) sangatlah banyak dan beragam. Layaknya seperti fenomena "gajah dan sekelompok orang buta", pemberian definisi dan interpretasi terhadap istilah tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang disiplin yang mendasarinya. Namun demikian, secara umum

analisis ekonomi formal tentang keberlanjutan, mengidentifikasi permasalahan umum dari hal tersebut berupa *concern* terhadap kesejahteraan generasi yang akan datang dalam menghadapi tekanan pertumbuhan terhadap lingkungan alam, sebagai akibat penyediaan berbagai barang dan jasa yang bernilai dalam rangka pemuasan kebutuhan, seperti ekstraksi bahan-bahan alam, penyerapan sampah, keindahan dan lainnya. Permasalahan lain yang menonjol adalah bagaimana kapasitas dalam sistem ekonomi mampu memberikan bentuk lain kesejahteraan bagi generasi yang akan datang dengan adanya penyusutan (*depletion*) yang terjadi pada sumber daya.

Winoto (2000) menjelaskan bahwa keberlanjutan merupakan suatu konsep nilai yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi yang akan datang, tanpa harus pula mengorbankan peluang generasi sekarang untuk tumbuh dan berkembang dan meletakkan dasar-dasar pengembangan bagi generasi akan datang. Pereduksian spasial dari konsep ini sehingga menjadi "kota yang berkelanjutan", meniscayakan pemenuhan syarat bahwa pembangunan perkotaan harus mampu memberikan jaminan untuk terus berkembang maju bagi penduduknya, demikian juga dalam memberikan fasilitas (baca: akses) yang memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal (*upward mobility*) bagi kelompok miskin, di samping tentunya tetap memberikan kontribusi terhadap kemajuan nasional (Wordlbank, 2000). Namun, hal terpenting saat ini bukanlah bagaimana membuat teori umum tentang pembangunan berkelanjutan, tetapi lebih terfokus pada isu-isu konseptual utama yang secara potensial memiliki implikasi penting dalam level operasionalnya (Wordbank, 1992, dan Serageidin, 1993). Sehubungan dengan isu tersebut, Serageidin (1993) menyatakan bahwa upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan akan gagal, kecuali jika kita dapat mengintegrasikan tiga sudut pandang tentang

pembangunan dari tiga disiplin ilmu yang berbeda yakni dari para ahli ekonomi, ekologi dan sosiologi.

Para ekonom melakukan pembangunan dengan menggunakan berbagai metoda untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia dibawa kendala (*constraints*) keterbatasan sumber daya (*capital stock*) dan teknologi yang ada. Oleh karena itu, pusat perhatian mereka kemudian adalah bagaimana menciptakan tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan efisiensi yang tinggi pula. Dan lazimnya dahulu, pengertian efisiensi ekonomi dipahami sebagai optimalisasi sumber daya alam untuk saat ini (*present value approach*) dengan mengabaikan upaya-upaya kompensasional untuk meredam percepatan proses pengurasan (*depletion process*), dan demi kepentingan generasi yang akan datang. Para ahli ekologi menekankan pembangunan berkelanjutan pada perlindungan terhadap integritas sub sistem ekologi sehingga stabilitas ekosistem global tetap terjamin. Terakhir, para sosiolog memiliki pendekatan tersendiri dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mereka cenderung menekankan pada aktor kunci pembangunan, yakni manusia melalui organisasi sosialnya. Dalam pendekatan tersebut mereka menyodorkan konsep serta teknik-teknik. Konsep yang disodorkan itu antara lain menjelaskan tentang tindakan sosial, hubungan antar manusia, bentuk kompleks organisasi sosial budaya, dorongan dan pendorong serta nilai-nilai sosial yang mengatur tingkah laku manusia terhadap sesamanya dan terhadap sumberdaya alam. Sedangkan teknik-teknik sosial dapat diterapkan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain koordinasi yang tetap dalam setiap tindakan sosial, mencegah perilaku yang merusak, mengembangkan kerjasama dan peningkatan *social capital*.

Dalam konteks pembangunan suatu wilayah, Winoto (2000) menjelaskan bahwa sebagai tema utama pembangunan, maka keberlanjutan (*sustainability*)

merupakan salah satu dari empat hal yang merupakan pusat perhatian praksis pembangunan, dimana tiga lainnya adalah perubahan terencana (*planned change*), transformasi struktural (*structural transformation*), dan otonomi (*autonomy*). Sebagai suatu paradigma yang sedang dalam proses perkembangan, menurutnya pencapaian pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan tujuh hal berikut, yakni pertama, sistem politik yang menjamin partisipasi efektif dan aman bagi warga negara dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Kedua, sistem ekonomi yang mampu menciptakan surplus dan teknologi yang berdasar pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat sendiri secara berkelanjutan. Ketiga, sistem sosial yang memberikan media bagi anggota atau kelompok masyarakat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang lahir akibat ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan. Keempat, sistem produksi yang memperhatikan keberlangsungan ekosistem. Kelima, adanya sistem teknologi yang secara terus-menerus mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Keenam, adanya sistem internasional yang menjamin tercapainya sistem hubungan perdagangan yang adil antar negara dan antar kelompok masyarakat. Dan terakhir, sistem administrasi yang fleksibel dan memiliki kemampuan untuk mengoreksi diri dari waktu ke waktu.

Berdasarkan semua uraian di atas, pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek ekonomi maupun non ekonomi, dengan mengintegrasikan tiga tujuan yang berbeda, yaitu (1) tujuan ekonomi, yakni pertumbuhan berkelanjutan dan efisiensi kapital, (2) tujuan sosial, yakni pengentasan kemiskinan dan pemerataan dan (3) tujuan ekosistem, yakni pengelolaan sumber daya yang menjamin keberlanjutan. Pengelaborasi lebih lanjut dari tiga tujuan di atas, akan mengantarkan kita kepada unsur-unsur penting yang ada dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu distribusi

pendapatan, *emploment* dan *targeted assistance* untuk tujuan ekonomi; partisipasi, konsultasi dan pluralisme untuk tujuan sosial dan terakhir untuk tujuan ekosistem adalah evaluasi dampak lingkungan, penilaian sumber daya dan internalisasi dampak.

Walaupun demikian bukan merupakan hal mudah menyatukan ketiga tujuan diatas dan akan terdapat *trade off* diantara tujuan-tujuan tersebut (Munansinghe, 1993). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, para ahli ekonomi memiliki pendekatan tersendiri dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Inti dari pendekatan tersebut adalah bahwa telah ada upaya penilaian terhadap nilai-nilai lingkungan serta sosial yang tidak tertransaksikan di pasar. Selain itu, untuk memfasilitasi *trade off* antara ketiga tujuan yang berbeda tersebut digunakan analisis multikriteria dengan indikator-indikator ekonomi, sosial dan lingkungan tertentu. Lebih jauh Munansinghe (1993), menguraikan usaha-usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi. Pertama adalah menelusuri dampak di tingkat "proyek pembangunan", yaitu dengan melakukan analisis biaya-manfaat. Jika manfaat suatu proyek pembangunan lebih besar daripada biayanya (termasuk biaya lingkungan dan sosial) maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kedua adalah menelusuri dampak di tingkat sektoral, yaitu dengan kebijakan "*pricing*" terhadap sumber daya terutama sumberdaya/jasa-jasa yang langka dan pengenaan biaya tambahan (*charges*) untuk menutupi dampak-dampak eksternal. Aturan dasar dalam *pricing* yang efisien adalah bahwa harga harus sama dengan biaya penyediaan satu unit tambahan (marginal) output. Selain itu, tipe analisis ekonomi dan lingkungan harus disertai dengan perencanaan jangka panjang dan komprehensif. Ketiga adalah menelusuri dampak di tingkat makro ekonomi berupa pendisainan ukuran-ukuran komplemen yang dapat menurunkan dampak negatif kebijakan dan meningkatkan dampak positif kebijakan, baik dalam

kebijakan ekonomi, lingkungan, maupun sosial, terutama dalam hal alokasi dan akses ke sumber daya.

#### 2.4. Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Wilayah

Sebelum lebih jauh menguraikan tentang perencanaan wilayah dan pembangunan wilayah, adalah penting terlebih dahulu untuk memahami tentang konsep pembangunan dan konsep wilayah itu sendiri. Rawls dalam Schipper (1987) menetapkan dua ide utama dari pembangunan yaitu kebebasan yang sejajar (*equal liberty*) dan keadilan yang sepadan (*equal equity*), dimana keduanya merupakan representasi dari dua hukum, yaitu *the law of equal liberty for all* dan *the law of general (for all) improvement (pareto optimal)*. Riddel (1985) menyatakan bahwa konsep pembangunan mengandung makna sebagai bentuk keseimbangan dari perubahan yang memberikan manfaat yang luas, dimana memiliki tujuan-tujuan berupa pertumbuhan ekonomi, perbaikan sosial (*social betterment*) dan kelestarian sumber daya (*resource husbandry*). Oleh karena itu, konsep pembangunan setidaknya harus mengandung tiga hal berikut, yaitu peningkatan kapasitas dan kebutuhan individu untuk dihargai dan dibutuhkan (*enlarge the capacity and desire of individuals to be usefull and wanted*), peningkatan kapasitas masyarakat sehingga mampu berswadaya (*expand the capacity of communities to become self sufficient*), dan peningkatan kesejajaran dan keadilan di masyarakat (*enhance the fairness and justice of society*). Todaro (1994) menjelaskan bahwa pembangunan itu paling tidak harus mempunyai sasaran untuk meningkatkan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan pokok, meningkatkan taraf hidup dan memperluas pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu.

Konsep wilayah merupakan konsep dasar yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum memahami dan melakukan perencanaan wilayah. Pengertian yang umumnya diterima adalah bahwa wilayah merupakan area geografis yang mempunyai ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi. Berdasarkan hal ini, wilayah dapat didefinisikan, dibatasi dan digambarkan berdasarkan ciri atau kandungan area geografis tersebut, meskipun ciri dan kandungan itu masih tetap merupakan hal yang masih terus diperdebatkan dan belum ada konsesus (Winoto, 2000). Rustiadi (2001) menjelaskan pengertian wilayah sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tidak ada batasan yang spesifik dari luasan suatu wilayah. Batasan yang ada lebih bersifat *meaningfull* baik untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian maupun evaluasi. Dengan demikian batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis. Pembahasan wilayah tidak lagi membahas mengenai tanah saja, tetapi telah mencakup ruang, dimana tanah merupakan salah satu komponennya dan merupakan komponen yang paling penting. Adapun yang dimaksud dengan komponen-komponen wilayah adalah mencakup komponen biofisik alam, sumber daya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaannya. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antara manusia dengan sumber daya-sumber daya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Oleh karenanya istilah wilayah (*region*) sangat umum dipakai baik dalam kajian sosial maupun fisik.

Pembangunan wilayah merupakan proses yang kompleks, dimana selain melibatkan berbagai segi-segi kehidupan yang berlangsung dalam suatu wilayah, juga melibatkan berbagai unsur-unsur yang membangun interaksi dalam

wilayah. Oleh karena itu, mengingat kompleksitas tersebut, maka pembangunan wilayah akan naif jika dilihat sekedar memberikan perubahan fisik atas suatu wilayah, dari suatu kawasan hutan misalnya menjadi suatu kawasan pemukiman, perdagangan atau lainnya. Meskipun demikian adalah sulit untuk melepaskan unsur ekonomi sebagai sesuatu yang memberikan energi terhadap dinamika perkembangan suatu wilayah. Dengan kata lain ekonomi wilayah merupakan bagian yang sentral, meskipun tidak berarti segala-galanya, sehingga hampir setiap kajian tentang pembangunan wilayah akan sulit dilepaskan dari perspektif ekonomi. Dalam konteks ini, Parr (1987) mengakui adanya hubungan yang erat antara ekonomi wilayah dengan struktur spasial bila dipandang dari sudut dinamika yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa studi-studi empiris telah dilakukan oleh Boisvet, Friedman dan Johnson dengan mencurahkan perhatian yang besar terhadap proses pergeseran dominasi suatu sektor oleh sektor lain dalam suatu wilayah, serta pengaruh dari perubahan ekonomi terhadap struktur spasial suatu wilayah. Demikian juga sifat dan tahapan perubahan perekonomian wilayah pada periode tertentu akan sangat dipengaruhi pula oleh bentuk struktur spasialnya. Dengan kata lain antara kedua hal tersebut di atas sesungguhnya akan selalu terjadi hubungan yang bersifat resiprokal (*reciprocal interaction*), dimana dapat disimpulkan bahwa pembangunan wilayah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pertumbuhan ekonomi wilayah, akan senantiasa terkait erat dengan keragaman jangkauan proses transformasi terhadap struktur wilayah.

Secara historis, terjadinya proses pembangunan wilayah dapat dikategorikan menjadi dua tipe atau pola, yaitu pembangunan wilayah yang berlangsung secara alamiah dan pembangunan wilayah yang berlangsung berdasarkan rekayasa manusia. Pola pertama proses pembangunan wilayah hampir sulit ditemukan saat ini. Pada pola pertama ini, perkembangan yang

berlangsung di suatu wilayah lebih bersifat spontanitas, ketimbang hasil campur tangan manusia dalam menyusun skenario perkembangan yang menjangkau ke masa depan. Jadi manusia atau masyarakat wilayah bersangkutan dalam tipe pertama ini, lebih bersifat reaktif dan pasif terhadap proses perkembangan yang terjadi. Sedangkan pada pola kedua, perkembangan suatu wilayah merupakan suatu proses yang dipandu secara relatif sadar berdasarkan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian pada pola kedua ini, campur tangan manusia melalui instrumen perencanaan yang disusun, telah terlibat jauh hari sebelum perkembangan-perkembangan itu terjadi. Jadi manusia atau masyarakat, secara proaktif ikut mendorong dan mengarahkan perkembangan dan perubahan yang berlangsung. Dan umumnya, hampir seluruh kota-kota di berbagai tempat dunia sekarang, demikian juga pusat-pusat pertumbuhan baru, berkembang dengan bentuk yang kedua diatas.

Terkait dengan tipe kedua pembangunan wilayah di atas, kita akan menemukan bahwa perencanaan wilayah merupakan unsur penting dari proses pembangunan wilayah yang berlangsung. Meskipun bukan merupakan sesuatu yang absolut, perencanaan wilayah hampir tidak dapat dilepaskan dari setiap pembangunan wilayah yang terjadi. Hampir seluruh pengambil keputusan di semua level pemerintahan diberbagai tempat, akan mencurahkan perhatian yang besar untuk penyusun perencanaan wilayah yang handal dan akurat.

Oleh sebab itu dalam melaksanakan pembangunan wilayah diperlukan perencanaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi spesifik lokal (*local specific*), baik mengenai kebutuhan-kebutuhan yang secara langsung dirasakan (*real needs*) ataupun yang secara tidak langsung dirasakan (*unreal needs*), agar tidak menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan di dalam wilayah itu sendiri, antar wilayah, maupun antar generasi (*inter-temporal*). Perkembangan yang tidak merata akan menimbulkan proses pencucian (*backwash effect*) dimana

sumberdaya di wilayah belakang (*hinterland*) mengalir ke wilayah yang lebih maju (pusat-pusat pertumbuhan). Oleh karena sumber daya yang tercuci relatif bermutu tinggi dan dibutuhkan untuk pembangunan wilayah asalnya, maka keadaan ini tidak menguntungkan bagi wilayah *hinterland*. Perencanaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi lokal merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi usaha-usaha mengurangi kesenjangan dan ketimpangan di dalam suatu wilayah. Sedangkan syarat kecukupan (*sufficient condition*) yaitu adanya *political will* dari pemerintah secara sungguh-sungguh untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan yang ada baik antar wilayah dan golongan masyarakat.

Perumusan format atau model perencanaan dan pengelolaan pengembangan wilayah dapat dilihat sebagai suatu upaya melakukan prakiraan bentuk format atau model yang akan terjadi pada masa yang akan datang dalam dua versi, yaitu : (1) proyeksi trayektoris, artinya menggunakan anggapan bahwa masa yang datang adalah merupakan perpanjangan atau kelanjutan masa yang lampau, (2) prakiraan konjektural, artinya bentuk yang diperkirakan akan terjadi pada masa mendatang merupakan wujud hasil yang terbentuk oleh faktor-faktor atau unsur-unsur lingkungan yang sangat berpengaruh pada waktu mendatang itu, (3) gabungan hasil kedua cara proyeksi di atas, dilakukan untuk mendapatkan perkiraan keadaan mendatang yang merupakan situasi kombinasi. Proyeksi trayektoris biasa digunakan untuk melakukan perkiraan besaran-besaran kuantitatif berdasarkan nilai berkala yang berkaitan dengan kejadian dari waktu ke waktu pada masa lalu (*time series data*) seperti populasi penduduk, ternak, rumah dan sebagainya. Sedangkan proyeksi konjektural dilakukan tidak dengan menggantungkan diri kepada adanya nilai berkala yang dapat dicatat, tetapi lebih mengandalkan kepada informasi kualitatif dan deskriptif yang memberikan gambaran tentang rangkaian peristiwa yang dapat memberikan arah

perkembangan dan pertumbuhan gejala yang sedang diamati atau dipelajari. Gabungan proyeksi diterapkan untuk memperkirakan situasi "transisioner" yang dialami pemerintah daerah dalam menghadapi arus desentralisasi, yang diperkirakan bagi setiap daerah tidak akan sama tingkat kesiapannya. Dalam situasi seperti ini maka berbagai kondisi tertentu dimasa lampau di berbagai daerah masih akan berlanjut atau terbawa kedepan untuk beberapa lama (Anonim 1999).

Rencana pengembangan wilayah membutuhkan satuan analisis dan satuan kerja. Satuan wilayah administratif, satuan sumberdaya alam, satuan ruang fungsional dapat menjadi satuan kerangka kerja pengelolaan upaya-upaya pengamanan wilayah tingkat lokal yang akan menurunkan format pemrograman pengembangan wilayah yang melahirkan satuan-satuan kerja proyek. Pada waktu yang sama rencana pengembangan juga memerlukan format tertentu, seperti format teknis (fisik dan spasial) untuk menyatakan dan menjabarkan kepentingan politis, kepentingan sosial, kepentingan ekonomis atau kepentingan pertahanan. Format rencana yang umum dipakai adalah dalam wujud dokumen perencanaan (deskriptif, analitis, preskriptif) dilengkapi dengan lampiran-lampiran grafis, tabulasi atau deskriptif (Anonim 1999).

## **2.5. Beberapa Teori Dalam Pembangunan Wilayah.**

Suasana keterbukaan, persaingan yang ketat di berbagai aspek kehidupan dan liberalisasi perdagangan akan berkait secara langsung dengan bidang pertanian, dimana tanah merupakan tempat tinggal, berusaha dan sumber daya pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya penyediaan tanah untuk pembangunan berbagai sektor agar stabilitas pembangunan dapat terjaga kelangsungannya.

Sebagaimana halnya di wilayah lain, Kota Palembang menghadapi masalah klasik dari penyediaan tanah untuk pembangunan yaitu terbatasnya persediaan tanah. Disisi lain jumlah penduduk meningkat diiringi dengan meningkatnya kualitas hidup, fungsi kota terhadap daerah sekitarnya, industrialisasi dan kemajuan iptek, hal ini mengakibatkan permasalahan pertanahan menjadi semakin kompleks.

Peningkatan pembangunan tidak saja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya semakin bertambah, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik yang merupakan dampak positif dari keberhasilan pembangunan. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa pembangunan yang semakin meningkat tersebut harus dilaksanakan di atas tanah yang luasnya terbatas baik luas wilayah secara kuantitatif, maupun secara kualitatif karena adanya ketidaksamaan potensi tanah antar wilayah.

Arah kebijakan pertanahan dalam mendukung pembangunan adalah pemanfaatan tanah hendaknya diselenggarakan secara optimal, seimbang, serasi dan lestari dengan pelaksanaan kegiatan pertanahan pada umumnya dan penyelenggaraan administrasi pertanahan pada khususnya, yang dilaksanakan dengan memberikan pertimbangan utama pada fungsi sosial dari tanah dan pemanfaatan tanah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan arah kebijakan pertanahan berkaitan dengan pembangunan daerah dan perkotaan diarahkan untuk menunjang pembangunan daerah yang merupakan suatu model penyajian informasi wilayah sebagai sarana didalam mendukung perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan serasi, disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah didalam konteks kesatuan pembangunan nasional,

disamping itu juga untuk menunjang upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perkotaan.

Todaro (1994) mengemukakan pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan proses sosial, ekonomi dan institusional, meliputi usaha-usaha memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks wilayah, proses pembangunan di suatu wilayah memperlihatkan adanya peningkatan pertumbuhan aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat dari waktu ke waktu, yang disertai mekanisme redistribusi kesejahteraan yang efektif dan efisien. Proses pembangunan tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan produksi, perubahan alokasi sumber daya produksi, perubahan pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan (institusional) serta memberikan kesempatan kerja yang bersifat produktif secara luas.

Ricardson (1973) menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah adalah fungsi dari penduduk dan tingkat pendapatan daerah belakangnya, sedangkan laju tingkat pertumbuhan tergantung pada laju tingkat permintaan dari daerah belakang atas barang dan jasa atau pelayanan di daerah perkotaan. Teori lain yang menjelaskan tentang perkembangan wilayah adalah teori sektor basis (*export base theory*). Teori ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana suatu wilayah (kota) tumbuh, dan kemudian mampu mendukung dan mempertahankan pertumbuhan wilayahnya. Ekonomi perkotaan terdiri atas aktifitas basis dan non basis. Aktifitas basis menghasilkan barang dan jasa untuk diekspor. Aktifitas non basis merupakan aktifitas yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi secara lokal. Aktifitas basis merupakan penentu dari pertumbuhan wilayah atau perkotaan. Peningkatan dalam aktifitas basis akan mengakibatkan pertumbuhan pendapatan, lapangan kerja dan produksi. Sedangkan penurunan aktifitas basis akan mengakibatkan penurunan total

aktifitas ekonomi dan lapangan kerja. Jadi pertumbuhan dari satu daerah perkotaan tergantung pada pertumbuhan aktifitas basisnya. Manfaat utama dari konsep basis ini adalah pada sifatnya yang simple sehingga merupakan teknik yang berguna bagi analisis pendahuluan dan prediksi. Kelemahan teori ini terletak pada beberapa hal yaitu; (1) pengukuran basis ekonomi, terutama menyangkut pembedaan aktifitas basis dan non basis. (2) Penekanan pada aktifitas ekspor sebagai basis, mengabaikan adanya kekuatan internal yang dapat mendriven perkembangan wilayah, sebagaimana dijelaskan oleh teori aglomerasi ekonomi. (3) Secara empiris teori ini merupakan pendugaan yang tidak memadai bagi pertumbuhan suatu wilayah atau perkotaan.

Teori sektor berkaitan dengan perubahan relatif tingkat kepentingan sektor-sektor ekonomi, misalnya dari pertanian ke industri, dan dari industri ke sektor jasa. Laju pertumbuhan dari sektor-sektor tersebut dinyatakan sebagai penentu utama laju pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator penting pertumbuhan suatu wilayah. Terjadinya perubahan pada sisi permintaan dan penawaran dapat menimbulkan perubahan. Pada sisi permintaan, elastisitas pendapatan dari permintaan bagi barang dan jasa adalah lebih tinggi daripada produk pertanian, sehingga adanya peningkatan pendapatan akan diikuti oleh pengalihan relatif sumber-sumber dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Pada sisi penawaran, pengalihan tenaga kerja dan modal terjadi akibat adanya perbedaan tingkat pertumbuhan produktivitas dalam sektor-sektor ekonomi tersebut. Sektor industri dan jasa menikmati perkembangan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga sektor-sektor ini mampu untuk menawarkan perolehan yang lebih tinggi pada tenaga kerja dan modal, dan akhirnya mendorong terjadinya perubahan pada sumber-sumber yang dibutuhkan oleh setiap sektor.

Teori sektor menekankan pada adanya perubahan internal daripada adanya perubahan eksternal seperti teori basis ekspor. Seterusnya pertumbuhan wilayah seperti pertama-tama merupakan suatu evolusi internal dari ekonomi subsistem ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi melalui spesialisasi dan pembagian dari tenaga kerja.

Teori struktur industri menjelaskan hubungan wilayah dan komposisi industrinya. Ide dasarnya adalah pertumbuhan dari industri merupakan penentu dari pertumbuhan suatu wilayah. Teori ini menyarankan bahwa adanya perbedaan dalam struktur industri antar wilayah merupakan satu penentu penting dari adanya perbedaan pertumbuhan di antara wilayah tersebut. Satu wilayah dengan berbagai industri yang baik akan mempunyai satu pengaruh yang besar pada laju pertumbuhan industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi wilayah tersebut. Perloff (1960), mengemukakan bahwa umumnya industri primer tumbuh dengan lambat sedang industri sekunder dan tertier tumbuh dengan cepat. Ia mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah adalah keputusan lokasional dan produksi dari kegiatan perusahaan dalam hubungannya dengan kebutuhan masukan dan pasar bagi industri yang tumbuh di dalam wilayah.

Teori lain yang menjelaskan tentang perkembangan wilayah adalah model kausa kumulatif yang dijelaskan oleh Myrdall (1957). Teori ini mengemukakan bahwa perencanaan kekuatan-kekuatan dalam pasar pada umumnya cenderung meningkatkan daripada mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kekuatan-kekuatan pasar menghasilkan pengelompokan aktifitas ekonomi yang meningkatkan keuntungan di dalam daerah tertentu (*economic of scale*). Adanya keuntungan awal seperti simpul jaringan transportasi, sumber daya alam dan lainnya, akan mendorong wilayah tersebut terus tumbuh, akibat adanya keuntungan eksternal yang dihasilkan dalam satu wilayah yang dicirikan

oleh satu konsentrasi dari aktifitas ekonomi. Tiap keuntungan yang mungkin dimiliki oleh wilayah belakang, seperti tenaga kerja murah, tidak dapat mengkompensasi keuntungan dari wilayah yang telah berkembang. Dan pertumbuhan wilayah belakang dihipotesiskan tergantung pada *spread effect* atau *backwash effect* yang terjadi.

Di dalam suatu sistem interaksi dari kota-kota dalam suatu ekonomi yang ruangnya berkembang, proses pertumbuhan yang melingkar dan kumulatif tidak terus berlangsung secara tidak terbatas untuk seluruh tempat. Kekuatan utama di belakang pertumbuhan wilayah utama adalah adanya keuntungan aglomerasi. Keuntungan awal ini tidak hanya sering menciptakan pengurangan biaya produksi, tetapi dengan menarik aktifitas-aktifitas, migrasi, kapital baru dan lain-lain akan terjadi peningkatan keuntungan di wilayah tersebut. Dengan jalan ini potensi pertumbuhan dari pusat pertumbuhan makin diperbesar.

Diantara beberapa teori tentang perkembangan wilayah, teori pusat pertumbuhan merupakan teori yang relatif paling laris dianut oleh berbagai negara, terutama negara-negara sedang berkembang. Inti dasar dari teori ini adalah, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada dan dengan mengambil manfaat dari aglomerasi ekonomi, diharapkan perkembangan suatu wilayah dapat dipercepat, dan kemudian diharapkan melalui proses deglomerasi melalui efek rembesan atau efek tetesan, akan menarik perkembangan wilayah-wilayah yang ada disekitarnya.

Konsep *growth-pole* menegaskan bahwa melalui investasi yang bersifat *capital intensive* pada sektor industri di pusat-pusat wilayah perkotaan yang terbesar, pemerintah di negara-negara berkembang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang akan menyebar keluar, sehingga menggerakkan pembangunan wilayah. *Economic of scale* yang terdapat di kota-kota terbesar akan menjanjikan tingkat pengembalian modal yang tinggi, mendukung

pelayanan perdagangan, administratif dan infrastruktur yang dibutuhkan bagi industri-industri untuk beroperasi secara efisien, dan juga mendorong terjadinya diversifikasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Diasumsikan bahwa barang yang diproduksi di wilayah ini diarahkan untuk ekspor. Demikian juga, wilayah ini akan memberikan dampak menetes ke bawah, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Investasi yang ditanam dibidang industri di wilayah pusat pertumbuhan juga dipandang sebagai *engine of development* bagi kegiatan pertanian dan perdagangan.

Secara historis perkembangan konsep *growth pole theory* dapat ditelusuri pada Francois Ferroux. Teori Ferroux mengenai pusat pertumbuhan merupakan teori yang menjadi dasar dalam strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang banyak dijalankan. Hakeket teori Ferroux tersimpul pada tiga hal berikut, yaitu *pertama*, di dalam proses pembangunan akan muncul industri pemimpin yang merupakan suatu industri yang menjadi penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Perkembangan yang terjadi pada industri ini akan menarik industri-industri lain yang memiliki hubungannya. *Kedua*, apabila suatu industri berkumpul dalam suatu daerah atau kawasan tertentu, keadaan ini akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi. Sebabnya adalah karena pengelompokan industri tadi akan menciptakan konsumen-konsumen yang mempunyai pola konsumsi yang berbeda dengan penduduk daerah perdesaan. *Ketiga*, karena secara geografis pembangunan ekonomi tidak seimbang, maka sesuatu perekonomian pada hakekatnya merupakan gabungan dari sistem yang secara relatif aktif keadaannya dan industri yang sifatnya relatif lebih pasif. Kumpulan industri yang pertama akan mempengaruhi pembangunan kumpulan industri yang kedua, dan seterusnya. Dan sejalan dengan Perroux diatas, Hirschman menjelaskan bahwa *“economic progress does not appear everywhere at the same time and that once it has appeared, powerfull forces*

*make for a spatial concentration of economic growth around the initial starting point*".

Pada kenyataannya, perkembangan yang terjadi sebagai buah strategi *growth pole* adalah pertumbuhan yang berlangsung di wilayah pusat tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang sama atau seimbang dengan wilayah-wilayah lainnya. Berkelanjutannya proses konsentrasi aktifitas ekonomi dan jumlah penduduk, telah merubah daerah tersebut menjadi raksasa-raksasa yang pada kenyataannya melakukan penghisapan terhadap wilayah di sekelilingnya. Keuntungan yang dihasilkan oleh wilayah tersebut pada hakikatnya tetap tinggal di wilayah tersebut, atau pindah ke pusat pertumbuhan yang lebih besar. Penerapan konsep ini di negara berkembang, seperti Indonesia, menyebabkan terjadinya hubungan eksploitatif antar wilayah, jadi jauh dari harapan yaitu hubungan mutualis antar wilayah. Hal ini sejalan dengan tesis Myrdall yang menegaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya *backwash effect* akan lebih dominan dibandingkan dengan *speed effect*, dalam mewarnai hubungan antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang terbelakang. Sedangkan Hirschman menggunakan istilah *polarization effect* sebagai konstrain yang menghambat perkembangan wilayah terbelakang. Sejalan dengan itu, kemajuan yang menetes ke bawah tidak menyentuh kalangan miskin, terutama yang berada di daerah pedesaan atau meskipun memberikan hasil kepada mereka, maka tidak lebih dari suatu keuntungan yang sangat tipis. Disimpulkannya bahwa pandangan optimistik yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan konvergensi pendapatan per kapita tidak didukung oleh keyakinan.

Gagalnya penerapan konsep pusat pertumbuhan menciptakan pemerataan dan sinergi antar wilayah, telah mendorong timbulnya pengkajian lebih mendalam tentang perlunya reformulasi konsep pembangunan wilayah

yang harus dijalankan di negara-negara berkembang. Antara lain konsep ini adalah *regional network*. Sebagai antithesis dari konsep pertama, maka konsep ini berupaya memadukan pembangunan yang berlangsung di setiap wilayah berada dalam suatu keterkaitan fungsional dan saling menguntungkan. Dengan demikian untuk memajukan beberapa wilayah tidak mesti memusatkan pertumbuhan pada satu kawasan saja, tetapi sebaliknya berusaha menyebarkan pertumbuhan tersebut ke wilayah-wilayah lain sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya dalam kerangka keterkaitan wilayah yang kuat.

Antara lain konsep keterkaitan wilayah di atas dapat dilihat pada konsep agropolitan. Paradigma dasar dari konsep ini adalah (1) hubungan perdesaaan dengan kota-kota dapat mencapai suatu tingkat sinergisme sepanjang hubungan fungsional dari kedua sub wilayah tersebut menghasilkan nilai tambah yang dapat didistribubikan melalui pengembangan suatu tatanan institusional yang secara benar menggambarkan status kelangkaan suatu sumber daya atau komoditas. (2) jika terjadi akumulasi modal, terdapat mekanisme pasar atau ekstra pasar yang dapat mengalirkan modal ke penggunaan yang dapat memberikan manfaat sosial yang terbesar. (3) perkembangan pusat pertumbuhan (kota) pada suatu tingkat akan mengalami *deminishing return* oleh sebab itu harus dibatasi melalui mekanisme ekstra pasar. Selain dengan konsep agropolitan ini maka tata ruang wilayah perdesaaan dikembangkan ke dalam satuan-satuan sabuk pengembangan yang independen dan kompetitif. Kompetisi diantara sabuk-sabuk pengembangan ini didorong melalui perkembangan institusional yang bebas. Ukuran luas sabuk pengembangan dibiarkan mencapai luas optimal melalui kebebasan berkompetisi antara agroindustri yang dikembangkan pada setiap sabuk pengembangan (Nasution, 1999).

Johar (1999) menjelaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi dalam pembangunan agropolitan, adalah adanya kebutuhan akan kesungguhan

kemauan politik dan kekuatan pasar untuk menghasilkan sejumlah pusat-pusat pertumbuhan yang optimum. Pertambahan pertumbuhan kota-kota dapat menjadi petunjuk tentang berapa banyak kota-kota kecil yang perlu dibangun dengan tujuan bukan hanya untuk menahan agar tidak terjadi migrasi penduduk atau tidak menjadikan penduduk terkonsentrasi di kota saja, tetapi juga untuk memberi lapangan kerja yang sesuai dan peningkatan pendapatan penduduk di tempat tersebut. Tetapi masalah yang dihadapi dalam membangun kota-kota baru adalah lebih banyaknya diperlukan aliran kapital yang besar. Sehingga biaya-biaya tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan biaya marjinal untuk membangun terus kota-kota yang sudah sedemikian pesat. Di samping itu, replikasi pembangunan kota-kota baru memerlukan koordinasi dan perencanaan yang lebih kompleks daripada memacu pembangunan kota lama.



## **BAB 3**

# **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

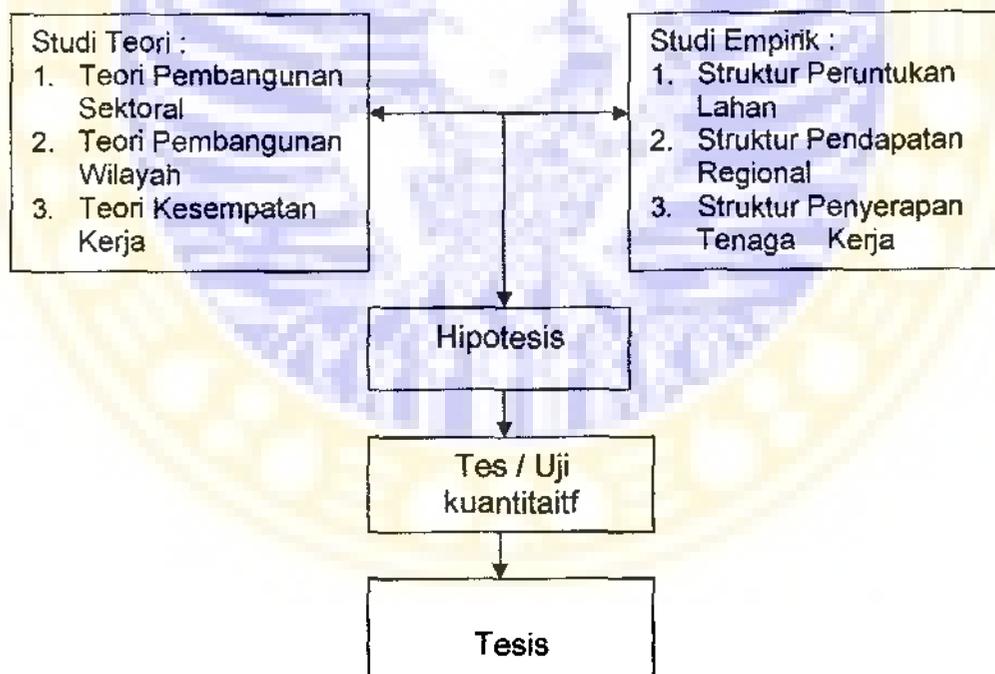
## BAB 3

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1. KERANGKA PROSES BERPIKIR

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka, terlebih dahulu disusun kerangka proses berpikir seperti pada Gambar 3.1.

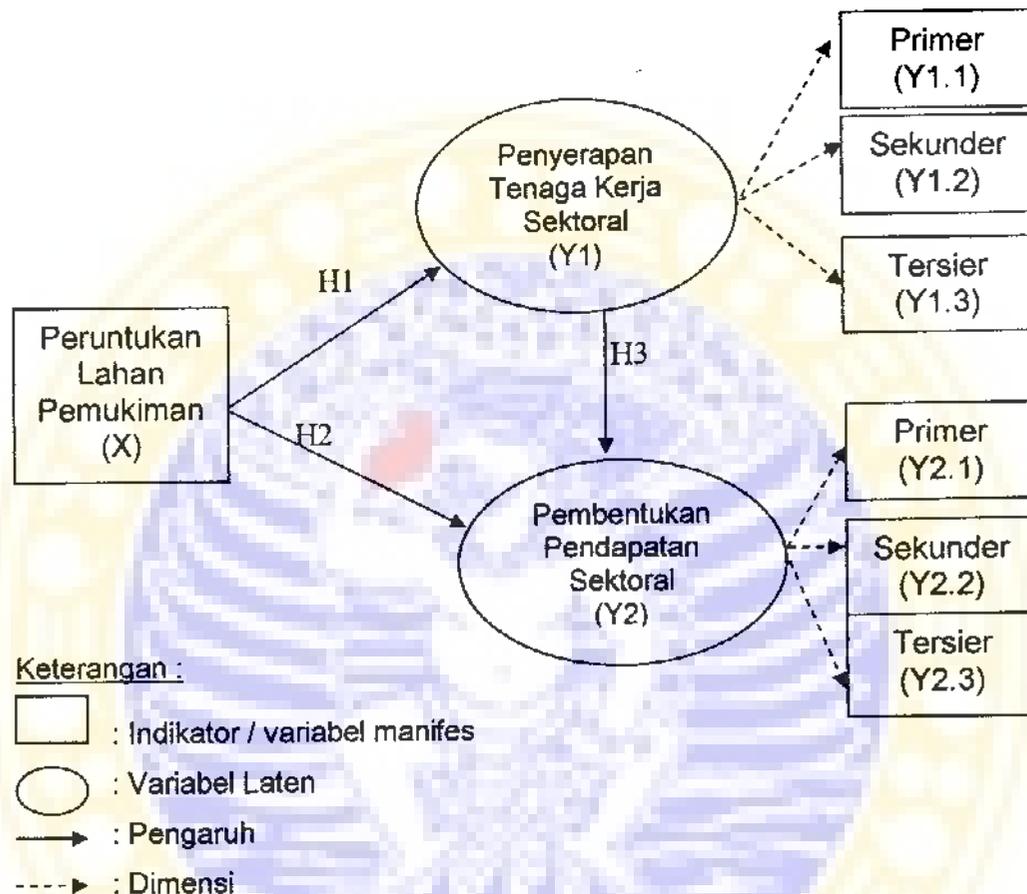
Kerangka Proses Berpikir menggambarkan alur penyusunan tesis yaitu dengan memadukan antara studi pustaka dan studi lapangan (data-data sekunder) untuk merumuskan hipotesis yang selanjutnya akan diuji secara kuantitatif dengan analisis jalur yang pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan.



**Gambar 3.1.**  
**KERANGKA PROSES BERPIKIR**

### 3.2. KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan kerangka proses berpikir tersebut disusun kerangka konseptual seperti pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. KERANGKA KONSEPTUAL

### 3.3. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Peruntukan lahan pemukiman di Kota Palembang berpengaruh terhadap pembentukan pendapatan kelompok sektoral.
2. Peruntukan lahan pemukiman berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja kelompok sektoral di Kota Palembang.
3. Penyerapan tenaga kerja kelompok sektoral berpengaruh terhadap pembentukan pendapatan kelompok sektoral di Kota Palembang.



## BAB 4

# METODE PENELITIAN

## **BAB 4**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Rancangan Penelitian**

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian ekplanatori, yaitu jenis penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis yang diuji adalah hubungan antara variabel peruntukan lahan pemukiman dengan penyerapan tenaga kerja sektoral dan pembentukan pendapatan sektoral di Kota Palembang Sumatera Selatan.

#### **4.2. Populasi Dan Sampel**

Data pada studi tesis ini berupa data sekunder mengenai pruntukan lahan bagi pemukiman, penyerapan tenaga kerja kelompok sektoral dan pembentukan nilai tambah kelompok sektoral di Kota Palembang, sejak tahun 1999 sampai dengan 2003. Data diperoleh dari dokumentasi instansi terkait, antara lain BPS, BAPEKO, PEMKOT dan lain sebagainya. Oleh karena itu, populasi dalam studi ini adalah seluruh wilayah Kota Palembang. Sedangkan sampel penelitian adalah seluruh populasi, sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian sensus.

#### **4.3. Variabel Penelitian**

##### **4.3.1 Klasifikasi Variabel Penelitian**

1. Variabel Eksogen (Independen):
  - Peruntukan Lahan Pemukiman (X)
2. Variabel Endogen (Intervening):
  - Penyerapan Tenaga Kerja kelompok Sektoral
3. Variabel Endogen (Dependen):
  - Pembentukan Pendapatan kelompok Sektoral

### 4.3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Peruntukan lahan pemukiman adalah luasnya (persentase) areal yang digunakan untuk tempat mendirikan bangunan bagi perumahan.
2. Penyerapan tenaga kerja sektoral adalah jumlah atau persentase tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan-kegiatan perekonomian sektoral.
3. Pembentukan Pendapatan sektoral adalah PDRB yang bersumber dari kegiatan-kegiatan perekonomian sektoral.

## 4.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk dokumen yang berupa berbagai laporan yang dipublikasikan secara resmi oleh lembaga pemerintahan antara lain oleh Pemerintah Kota Palembang, Biro Pusat Statistik.
2. Wawancara dengan cara tanya jawab dengan berbagai pihak yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

## 4.5 Analisis Data

### 4.5.1. Analisis Faktor

Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menganalisis data dari indikator untuk masing-masing variabel laten, yaitu variabel penyerapan tenaga kerja dan variabel pembentukan nilai tambah kelompok sektoral. Tujuannya adalah agar diperoleh data dari variabel laten bersangkutan, yang selanjutnya akan dilakukan analisis path guna pengujian hipotesis.

#### a) Konsep Dasar Analisis Faktor

Misal terdapat variabel  $X_1, X_2, \dots, X_p$  yang menyebar normal dengan vektor nilai tengah  $\mu$  dan var-cov matrix  $\Sigma$ ,

$$X \approx N_p(\mu, \Sigma)$$

maka dapat dibuat model analisis faktor sebagai berikut

$$\begin{aligned} X_1 &= c_{11} F_1 + c_{12} F_2 + \dots + c_{1p} F_p + \varepsilon_1 \\ X_2 &= c_{21} F_1 + c_{22} F_2 + \dots + c_{2p} F_p + \varepsilon_2 \end{aligned}$$

$$X_p = c_{p1} F_1 + c_{p2} F_2 + \dots + c_{pp} F_p + \varepsilon_p$$

Dalam bentuk catatan matriks dituliskan sebagai berikut :

$$X = c F + \varepsilon$$

Faktor yang *eigen value*-nya lebih besar dari satu ( $\lambda > 1$ ) misalkan hanya dua, yaitu  $F_1$  dan  $F_2$ , sehingga diputuskan hanya ada 2 faktor yang bermakna (hal ini akan dibahas pada uraian berikutnya).

Metode pendugaan pembobot (*loading*) dalam analisis faktor, antara lain adalah metode kemungkinan maksimum dan solusi *principle component analysis* (PCA). Data input untuk PCA dapat berupa matriks kovarians (S) atau matriks korelasi (R). Matriks kovarians digunakan bilamana unit satuan dari seluruh variabel yang akan dianalisis adalah sama, dan bilamana tidak digunakan R. Dari R atau S diperoleh  $\lambda_j$  (*eigen value*) dan  $a_j$  (*eigen vektor*) yang berpadanan, di dalam PCA  $a_j$  merupakan pembobot atau *loading* komponen pokok. Pembobot atau *loading* faktor adalah :

$$c_j = \sqrt{\lambda_j} a_j$$

### 1. Faktor Bermakna

Bilamana pendugaan *loading* faktor ( $c_{ij}$ ) menggunakan solusi PCA, maka indikator dan kriteria yang berlaku pada PCA juga berlaku untuk Analisis Faktor. Faktor yang dipertimbangkan bermakna adalah bilamana *eigen value*-nya lebih besar satu ( $\lambda \geq 1$ ) dan atau keragaman kumulatifnya kira-kira 75 %.

## 2. Skor Faktor

Seringkali analisis faktor merupakan analisis awal dari suatu permasalahan dalam penelitian, yaitu upaya mendapatkan variabel baru atau variabel laten. Untuk selanjutnya dapat dilakukan analisis dengan berbagai metode, misalnya model struktural, analisis path, analisis cluster, analisis konjoin, MDS atau MANOVA atau lainnya. Dengan demikian, variabel laten tersebut harus ada datanya, yaitu merupakan skor faktor.

Bilamana matriks input data adalah  $S$ , maka skor faktor dihitung dengan rumus :

$$S-Fa = c'S^{-1}(x_j - \bar{x})$$

Bilamana matriks input data adalah  $R$ , maka skor faktor dihitung dengan rumus :

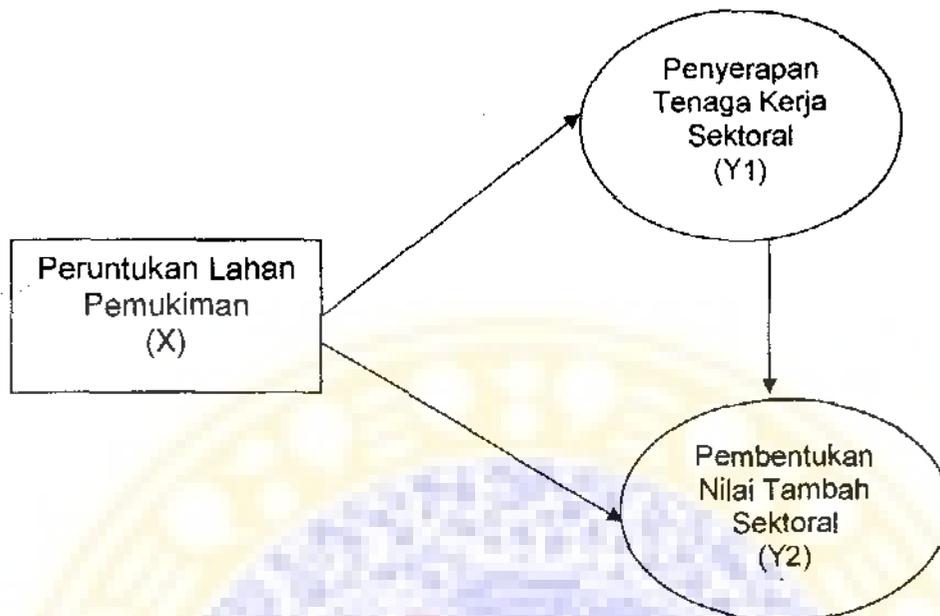
$$S-Fa = c'R^{-1}Z_j$$

### 4.5.2. Analisis Jalur

Analisis path digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 1 sampai dengan 3. Adapun langkah-langkah analisis path dapat dilihat pada uraian berikut.

#### a) Pertama

Langkah pertama di dalam analisis jalur adalah merancang model berdasarkan konsep dan teori. Berdasarkan hubungan-hubungan antar variabel secara teoritis tersebut, dapat dibuat model dalam bentuk diagram path sebagai berikut.



**Gambar 4.1.**  
**Diagram Path hubungan antar variabel secara teoritis**

Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, sehingga membentuk sistem persamaan. Sistem persamaan ini ada yang menamakan sistem persamaan simultan, atau juga ada yang menyebut model struktural.

$$(1) \quad Z_{Y1} = p_1 Z_X + \varepsilon_1$$

$$(2) \quad Z_{Y2} = p_2 Z_X + p_3 Z_{Y1} + \varepsilon_2$$

Mengingat model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian dan berbasis teori dan konsep, maka dinamakan model hipotetik. Model hipotetik yang dibangun bisa lebih dari satu, terutama bilamana landasan konsepnya belum mapan.

#### **b) Kedua**

Langkah kedua dari analisis path adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. Asumsi yang melandasi analisis path adalah :

1. Di dalam model analisis path, hubungan antar variabel adalah linier dan aditif

2. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran causal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung causal resiprokal tidak dapat dilakukan analisis path.
3. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval.
4. Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel).
5. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

### c) Ketiga

Langkah ketiga di dalam analisis path adalah pendugaan parameter atau perhitungan koefisien path. Perhitungan koefisien pada gambar diagram path pada uraian sebelumnya dijelaskan sebagai berikut :

- (1). Untuk anak panah bolak-balik  $\longleftrightarrow$  , koefisiennya merupakan koefisien korelasi,  $r$  (dihitung seperti biasanya)
- (2). Untuk anak panah satu arah  $\longrightarrow$  digunakan perhitungan regresi variabel dibakukan, secara parsial pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan adalah OLS, yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekursif. Dari perhitungan ini diperoleh koefisien path pengaruh langsung.

Di dalam model regresi dengan variabel dibakukan, dapat dilihat bahwa konstanta (intercept) tidak ada ( $p_0 = 0$ ), secara teoritis memang demikian. Besarnya sokongan pengaruh setiap variabel  $X$  terhadap  $Y$  adalah kuadrat dari koefisien regresi variabel standardize. Di dalam analisis path, di samping ada pengaruh langsung juga terdapat pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Koefisien  $p_i$  dinamakan koefisien path pengaruh langsung. Sedangkan pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dihitung dengan cara :

1. Pengaruh tidak langsung = perkalian pengaruh langsung
2. Pengaruh total = penjumlahan dari pengaruh langsung dan seluruh pengaruh tidak langsung.

Pendugaan parameter dengan Metode OLS, di mana di dalam software SPSS dihitung melalui analisis regresi, yaitu dilakukan pada masing-masing persamaan secara sendiri-sendiri.

#### d) Keempat

Langkah keempat di dalam analisis path adalah pemeriksaan validitas model. Sahih tidaknya suatu hasil analisis tergantung dari terpenuhi atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Telah disebutkan bahwa dianggap semua asumsi terpenuhi.

Terdapat dua indikator validitas model di dalam analisis path, yaitu

##### (a) Koefisien Determinasi Total

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model di ukur dengan :

$$R_m^2 = 1 - P_{e1}^2 P_{e2}^2 \dots P_{ep}^2$$

dalam hal ini, interpretasi terhadap  $R_m^2$ , sama dengan interpretasi koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada analisis regresi.

##### (b) Theory Trimming

Uji validasi koefisien path pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan pada regresi, menggunakan nilai p dari uji t, yaitu pengujian koefisien regresi variabel dibakukan secara parsial. Berdasarkan theory trimming, maka jalur-jalur yang nonsignifikan dibuang, sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empirik.

**d) Kelima**

Langkah terakhir di dalam analisis path adalah melakukan interpretasi hasil analisis. Pertama dengan memperhatikan hasil validitas model. Untuk data ilustrasi, diperoleh informasi sebagai berikut :

- (a) Berdasarkan koefisien determinasi total, diperoleh bahwa model dapat menjelaskan informasi yang terkandung di dalam data, sebesar 61,28 %. Angka ini cukup besar, sehingga layak dilakukan interpretasi lebih lanjut.
- (b) Lintasan pengaruh yang signifikan adalah dari Motivasi ke Kinerja melalui Loyalitas.

Kedua, hitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh kausal ke variabel endogen. Di dalam ilustrasi, seandainya seluruh lintasan signifikan, maka harus dihitung pengaruh total dari Motivasi, Kepuasan dan Loyalitas terhadap Kinerja. Variabel dengan pengaruh total terbesar adalah yang memiliki pengaruh terkuat.



**BAB 5**

**ANALISIS HASIL STUDI**

## **BAB 5**

### **ANALISIS HASIL STUDI**

#### **5.1 Kondisi Kota Palembang**

Secara geografis Kota Palembang terletak pada 104°37' - 104°52' Bujur Timur dan 2°52' - 3°5' Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 12 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Palembang adalah 37.403 Ha. Batas wilayah Kota Palembang sebelah Timur dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 yang telah diundangkan pada tanggal 11 Desember 2000 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000, jumlah Kecamatan dalam Kota Palembang mengalami pemekaran dari 8 (delapan) menjadi 14 (empat belas) Kecamatan. Jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan hasil pengolahan data dari kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Penduduk berkelanjutan (P4B) tahun 2003, jumlah penduduk Kota Palembang sebesar 1.287.435 jiwa yang terdiri dari 644.646 laki-laki dan 642.789 perempuan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 1999 – 2009, Kota Palembang dalam konstelasi nasional ditetapkan sebagai salah satu pusat kegiatan nasional yang mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani aktivitas berbagai provinsi maupun dalam lingkup nasional.

Sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta pusat pengolahan industri, Palembang didukung oleh letak geografis yang sangat

strategis; berada pada posisi kawasan segitiga perdagangan ASEAN (Indonesia, Malaysia dan Singapura). Kondisi ini didukung pula oleh posisi kota yang terbelah oleh Sungai Musi yang mengalir dan bermuara di Selat Malaka serta keberadaan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II yang fasilitasnya telah ditingkatkan, sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi bagi lalu lintas barang dan jasa dari dan keluar Kota Palembang.

## 5.2 Hasil Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap seluruh indikator dari masing-masing variabel disajikan pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 5.1.**  
**HASIL ANALISIS DESKRIPTIF PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**DALAM KURUN WAKTU 1999 - 2003**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Primer	56646,00	85543,00	72542,4000	11338,38120
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Primer (%)	,48	,72	,5980	,10986
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Sekunder	3613360,00	9695337,00	6648954,6000	2585425,08075
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Sekunder (%)	45,29	55,45	51,1740	4,84814
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Tersier	4308267,00	8082536,00	5999758,4000	1503822,50016
PDRB Harga Berlaku Ke-lompok Sektor Tersier (%)	44,00	54,00	48,2280	4,74861

Tabel tersebut menunjukkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Palembang didominasi oleh Kelompok Sektor Sekunder (51,17 %), sedangkan Kelompok Sektor Primer kontribusinya sangat kecil (0,60 %)

**Tabel 5.2.**  
**HASIL ANALISIS DESKRIPTIF PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN**  
**DALAM KURUN WAKTU 1999 - 2003**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Primer	21438,00	35479,00	31018,00	5551,04301
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Primer (%)	,70	,87	,8280	,07190
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Sekunder	1320941,00	1974703,00	1767213,40	258355,65190
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Sekunder (%)	43,22	49,29	47,3100	2,41291
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Tersier	1714189,00	2164038,00	1925382,00	177431,53353
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Tersier (%)	49,84	56,08	51,8620	2,48283

Berbeda dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Palembang didominasi oleh Kelompok Sektor Tersier (51,86 %), sedangkan Kelompok Sektor Primer kontribusinya sangat kecil (0,83 %).

**Tabel 5.3.**  
**KONDISI PERUNTUKAN LAHAN PEMUKIMAN**  
**DALAM KURUN WAKTU 1999 – 2003 KOTA PALEMBANG**

Tahun	Peruntukan lahan Pemukiman (Ha)	Peruntukan lahan pemukiman (%)
1999	10945,85	29,27
2000	11067,55	29,59
2001	11484,05	30,07
2002	11834,60	31,64
2003	12396,30	33,14
Rerata	11545,67	30,74

Luas wilayah Kota Palembang 37.403 Ha

Peruntukan lahan pemukiman di Kota Palembang menunjukkan suatu kenaikan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, baik luasannya maupun persentasenya. Hal ini sangat terkait dengan perkembangan jumlah penduduk di Kota Palembang

**Tabel 5.4.**  
**HASIL ANALISIS DESKRIPTIF PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL**  
**DALAM KURUN WAKTU 1999 – 2003 DI KOTA PALEMBANG**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Primer (orang)	2201,00	2472,00	2336,4000	101,55196
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Primer (%)	3,95	4,68	4,4560	,29288
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Sekunder (orang)	18784,00	22686,00	20319,2000	1481,42202
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Sekunder (%)	36,29	40,00	38,6620	1,41844
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Tersier (orang)	25974,00	37362,00	30074,0000	4372,09401
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Tersier (%)	55,32	59,76	56,8820	1,70954

Terjadi konsistensi antara PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor, yaitu pada kelompok sektor primer kontribusinya terkecil (4,45 %).

### 5.3 Hasil Analisis Faktor Konfirmatori

Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk mendapatkan data dari variabel laten yang berasal dari indikator-indikator penyusunnya. Data yang diperoleh berupa data komposit dari masing-masing indikator dengan pembobot berupa *loading factor*. Hasil analisis faktor konfirmatori secara lengkap disajikan pada Lampiran 2. Nilai *loading factor* semakin besar mengindikasikan kontribusi sebagai pengukur variabel laten terkuat, sedangkan tanda plus atau minus menunjukkan arah. *Loading factor* dari setiap indikator untuk masing-masing variabel disajikan sebagaimana pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 5.5.**  
**LOADING FACTOR INDIKATOR DARI VARIABEL PDRB ATAS DASAR**  
**HARGA BERLAKU DI KOTA PALEMBANG**

INDIKATOR	<i>Loading factor</i>
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Primer (%)	,974
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Sekunder (%)	-,994
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Tersier (%)	,993
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
a 1 components extracted.	

Secara garis besar semua kelompok sektor memberikan bobot pengukuran yang besar terhadap variabel pembentukan nilai tambah sektoral. Namun demikian kelompok sektor Tersier memberikan kontribusi terkuat, sedangkan kelompok sektor primer terlemah. Di sisi lain, kelompok sektor sekunder memiliki arah kontribusi negatif.

**Tabel 5.6.**  
**LOADING FACTOR INDIKATOR DARI VARIABEL PENYERAPAN**  
**TENAGA KERJA SEKTORAL DI KOTA PALEMBANG**

INDIKATOR	Loading factor
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Primer (%)	,997
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Sekunder (%)	,999
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Tersier (%)	-1,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
a 1 components extracted.	

Relatif konsisten dengan variabel pembentukan nilai tambah sektoral, bahwa secara garis besar semua kelompok sektor memberikan bobot pengukuran yang besar terhadap variabel penyerapan tenaga kerja sektoral. Akan tetapi yang memiliki kontribusi dengan arah negatif adalah kelompok sektor tersier.

#### 5.4 Hasil Pemeriksaan Asumsi Analisis Jalur

##### a. Linieritas

Hasil pemeriksaan asumsi linieritas selengkapnya disajikan pada Lampiran 3. Pendekatan yang digunakan merujuk pada konsep *parsimony*, yaitu bilamana seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian signifikan atau nonsignifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian meliputi model linier, kuadratik, kubik, *inverse*, *logarithmic*, *power*, *S*, *compound*, *growth* dan eksponensial. Hasil pemeriksaan asumsi linieritas untuk setiap hubungan antar variabel disajikan secara ringkas sebagai berikut.

**Tabel 5.7.**  
**PENGUJIAN ASUMSI LINIERITAS**

<i>Variabel Independen</i>	<i>Variabel Dependen</i>	<i>Hasil Pengujian (<math>\alpha = 0.05</math>)</i>	<i>Keterangan</i>
Peruntukan Lahan Pemukiman	Penyerapan tenaga kerja sektoral	Semua model nonsignifikan	Linier
Peruntukan Lahan Pemukiman	Pembentukan nilai tambah sektoral	Model linier signifikan	Linier
Penyerapan tenaga kerja sektoral	Pembentukan nilai tambah sektoral	Semua model nonsignifikan	Linier

Tabel 5.7. menunjukkan bahwa semua bentuk hubungan antar variabel yang terdapat di dalam model struktural adalah linier. Dengan demikian asumsi linieritas pada Analisa Jalur terpenuhi.

**b. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah**

Sesuai dengan kerangka konsep (Gambar 3.2) dan hipotesis studi, maka model struktural di dalam studi tesis ini tidak mengandung jenis hubungan resiprokal (pengaruh timbal balik). Dengan kata lain, model struktural di dalam penelitian ini adalah model kausal satu arah, sehingga asumsi model rekursif terpenuhi.

**c. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval**

Semua variable di dalam penelitian ini adalah variable laten, sehingga sebelum dilakukan analisis path, terlebih dahulu dilakukan analisis faktor (Lampiran 2). untuk mendapatkan data dari variable laten tersebut. Data variable laten hasil analisis factor adalah berupa skor factor, dimana data ini berskala interval dan berdistribusi normal standart. Sehingga asumsi variable endogen berskala interval terpenuhi.

d. **Observed variables** diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel)

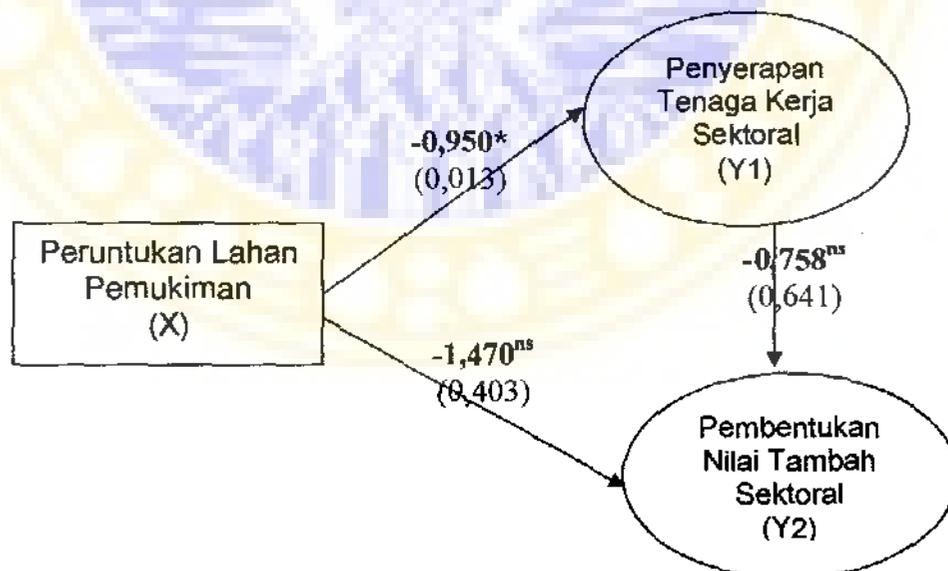
Di dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga asumsi ini tidak bersifat kritis dan dapat terpenuhi.

e. **Model yang dianalisis dispesifikasikan (didentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan**

Perancangan model di dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka konseptual penelitian yang telah diturunkan dari hasil telaah terhadap teori-teori dan penelitian terdahulu, seperti tertuang dalam bab tinjauan pustaka, sehingga asumsi ini telah terpenuhi.

### 5.5 Hasil Analisis Jalur: Pengujian Hipotesis Penelitian

Proses perhitungan analisis jalur dilakukan dengan bantuan program SPSS, dalam hal ini perhitungan koefisien jalur pengaruh langsung dilakukan dengan pendekatan analisis regresi dengan data *standardize*. Hasil analisis jalur menggunakan pendekatan analisis regresi tersebut disajikan pada Lampiran 4. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian tesis ini disajikan pada diagram berikut:



**Gambar 5.1**  
**Diagram hasil pengujian hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara melihat koefisien jalur secara parsial, dengan kriteria jika nilai  $p$  ( $p$ -value) lebih kecil dari taraf nyata  $\alpha$ , maka dikatakan signifikan

Berdasarkan diagram tersebut, maka dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Peruntukan lahan pemukiman di Kota Palembang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral adalah signifikan. Diperoleh koefisien jalur sebesar  $-0,950$  dengan  $p$ -value =  $0,013$ , pengaruh negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak lahan yang diperuntukan bagi pemukiman mengakibatkan penyerapan tenaga kerja berkurang. Dengan demikian hipotesis penelitian 1 diterima.
2. Peruntukan lahan pemukiman berpengaruh terhadap pembentukan nilai tambah sektoral di Kota Palembang adalah nonsignifikan, dengan koefisien jalur sebesar  $-1,470$  dan  $p$ -value =  $0,403$ . Dengan demikian hipotesis penelitian 2 ditolak.
3. Penyerapan tenaga kerja kelompok sektoral berpengaruh terhadap pembentukan nilai tambah sektoral di Kota Palembang, dengan koefisien jalur sebesar  $-0,758$  dan  $p$ -value =  $0,641$ . Dengan demikian hipotesis penelitian 3 ditolak.



**BAB 6**

**PEMBAHASAN**

## BAB 6

### PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil studi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai teori dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Pada akhir pembahasan akan disampaikan temuan teoritis dan keterbatasan dari studi ini. Adapun pembahasan dan analisis studi secara lebih rinci sebagai berikut :

#### **6.1 Pengaruh Peruntukan Lahan Pemukiman Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral**

Peruntukan lahan pemukiman berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral.

Pembangunan pemukiman tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi, dalam arti lahan untuk pemukiman adalah lahan yang tidak produktif sehingga dengan banyaknya pembangunan/pemanfaatan lahan untuk pemukiman tidak bisa menyerap tenaga kerja yang banyak karena klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sangat terbatas (kecil) yang mempunyai keahlian di bidang bangunan saja (Kelompok Sektor Sekunder).

Selain itu, karena di perkotaan (Kota Palembang) pada umumnya pemukiman kelas menengah ke bawah maka tidak memacu pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, sehingga tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja (penyerapan tenaga kerja rendah). Begitu juga dengan sektor jasa (Kelompok Sektor Tersier) juga tidak berkembang dengan pesat sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor jasa juga rendah.

Untuk pemukiman di luar kota akan mendesak sektor pertanian (kelompok sektor Primer) karena penambahan pemukiman akan mengurangi

lahan pertanian yang akibatnya penyerapan tenaga di sektor pertanian juga berkurang.

Seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya, peruntukan lahan pemukiman adalah luasnya (prosentase) areal yang digunakan untuk tempat mendirikan bangunan bagi perumahan, kondisi ini tidak berarti adanya peruntukan lahan pemukiman tidak dapat menyerap tenaga kerja sektoral. Pada kenyataannya timbulnya lahan pemukiman baru dapat menyerap tenaga kerja sektoral. Hal ini juga berkaitan dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang didukung oleh Pemerintah Kota Palembang dimana dengan ditunjuknya Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XVI tahun 2004, maka sejak tahun 2000 hampir semua program pembangunan diprioritaskan untuk mensukseskan penyelenggaraan PON ke XVI tersebut dengan membangun berbagai sarana dan prasarana fisik berupa perumahan atlet, sarana olah raga dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan adanya prioritas pembangunan tersebut maka secara otomatis dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2004 tenaga kerja yang dapat diserap di Kota Palembang sebagian besar adalah tenaga kerja di bidang bangunan dan itupun tidak terlalu banyak. sehingga meskipun secara kuantitas pembangunan di Kota Palembang berkembang pesat, namun karena hanya terfokus pada satu bidang pembangunan maka penyerapan tenaga kerja menurun. Program prioritas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang hanya mengutamakan kesuksesan penyelenggaraan PON XVI dan kurang mendorong sektor yang lain tersebut turut mempengaruhi rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kota Palembang.

Hal ini sesuai dengan teori Todaro yang menyatakan bahwa perencanaan spasial yang diarahkan pada penciptaan tingkat efisiensi dan efektifitas maksimal pemanfaatan ruang, dengan mengingat faktor konstrain, yaitu luasan lahan yang

relatif konstan, maka perencanaan sektoral dimaksudkan untuk mendorong kemajuan dinamika sektoral sehingga menghasilkan output yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan di sisi lain adalah untuk mempertahankan keberlanjutan proses pembangunan yang berlangsung. Dalam kerangka peningkatan lapangan kerja produktif regional, maka mutlak disusun perencanaan sektoral yang akurat, dalam arti pemilihan sektor prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi wilayah. Demikian juga dalam konteks mendorong akselerasi perkembangan ekonomi wilayah, pemilihan sektor yang akan dikembangkan juga harus memperhitungkan potensinya untuk menciptakan aglomerasi dan intensitas keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya.

Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat menuntut adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang secara makro berarti juga peningkatan pendapatan agregat masyarakat. Persyaratan ini menyebabkan perlunya diupayakan penciptaan lapangan kerja produktif regional.

## **6.2 Pengaruh Peruntukan Lahan Pemukiman Terhadap Pembentukan Nilai Tambah Sektoral**

Peruntukan lahan pemukiman berpengaruh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan nilai tambah sektoral.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa, adanya peruntukan lahan pemukiman tidak secara otomatis dapat menumbuhkan pembentukan nilai tambah sektoral. Tetapi pada kenyataannya hipotesis ini tidak selalu benar, dimana untuk pembukaan lahan pemukiman yang berada dekat pusat kota, didukung infrastruktur dan tingkat keamanan serta kebijakan dan perencanaan dari pemerintah kota yang baik akan berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai tambah sektoral. Pemerintah hendaknya mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Pembangunan pemukiman ( salah satu sektor bangunan) di Kota Palembang memberikan kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan PDRB dimana sektor Bangunan dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2003 hanya memberikan kontribusi pertumbuhan PDRB dibawah 5 (lima) persen yaitu tahun 1999 sebesar 4,17 %; tahun 2000 sebesar 3,48 %; tahun 2001 sebesar 3,61 %; tahun 2002 sebesar 3,74 % dan tahun 2003 sebesar 3,86 %. Hal ini sangat kecil dibandingkan dengan sektor Industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sehingga perkembangan luas areal pemukiman tidak akan berpengaruh signifikan terhadap PDRB serta pembentukan nilai tambah sektoral. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Palembang Atas Dasar Harga Konstan 1993 dapat dilihat pada Lampiran V.

Belum terciptanya budaya pembangunan wilayah melalui pendekatan ekonomi dapat menimbulkan peruntukan lahan untuk pemukiman kurang memperoleh manfaat dalam pembentukan nilai sektoral.

Hal tersebut sesuai dengan teori Munasinghe yang menguraikan usaha-usaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan melalui pendekatan ekonomi, diantaranya pertama adalah menelusuri dampak di tingkat "proyek pembangunan", yaitu dengan melakukan analisis biaya-manfaat. Jika manfaat suatu proyek pembangunan lebih besar daripada biayanya (termasuk biaya lingkungan dan sosial) maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kedua adalah menelusuri dampak di tingkat sektoral, yaitu dengan kebijakan "*pricing*" terhadap sumber daya terutama sumberdaya/jasa-jasa yang langka dan pengenaan biaya tambahan (*charges*) untuk menutupi dampak-dampak eksternal. Aturan dasar dalam *pricing* yang efisien adalah bahwa harga harus sama dengan biaya penyediaan satu unit tambahan (*marginal*) output. Selain itu, tipe analisis

ekonomi dan lingkungan harus disertai dengan perencanaan jangka panjang dan komprehensif. Ketiga adalah menelusuri dampak di tingkat makro ekonomi berupa pendisainan ukuran-ukuran komplemen yang dapat menurunkan dampak negatif kebijakan dan meningkatkan dampak positif kebijakan, baik dalam kebijakan ekonomi, lingkungan, maupun sosial, terutama dalam hal alokasi dan akses ke sumber daya.

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, masih lemahnya perencanaan dan tidak didukung kebijakan pemerintah daerah secara maksimal, maka secara langsung tidak akan berpengaruh kepada Pembentukan Nilai Tambah Sektoral.

### **6.3 Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pembentukan Nilai Tambah Sektoral**

Penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan nilai tambah sektoral. Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa penyerapan tenaga kerja tidak selalu berdampak pada pembentukan nilai tambah sektoral. Belum siapnya tenaga kerja sektoral dalam menghadapi perubahan serta tidak didukung sarana prasarana yang memadai dapat menimbulkan pengaruh terhadap nilai tambah sektoral. Dalam kerangka peningkatan lapangan kerja produktif regional, maka mutlak disusun perencanaan sektoral yang akurat, dalam arti pemilihan sektor prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi wilayah. Demikian juga dalam konteks mendorong akselerasi perkembangan ekonomi wilayah, pemilihan sektor yang akan dikembangkan juga harus memperhitungkan potensinya untuk menciptakan aglomerasi dan intensitas keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya.

Di Kota Palembang, dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2003 pembangunan kota lebih difokuskan pada pembangunan fisik khususnya untuk mensukseskan penyelenggaraan PON ke XVI pada tahun 2004.

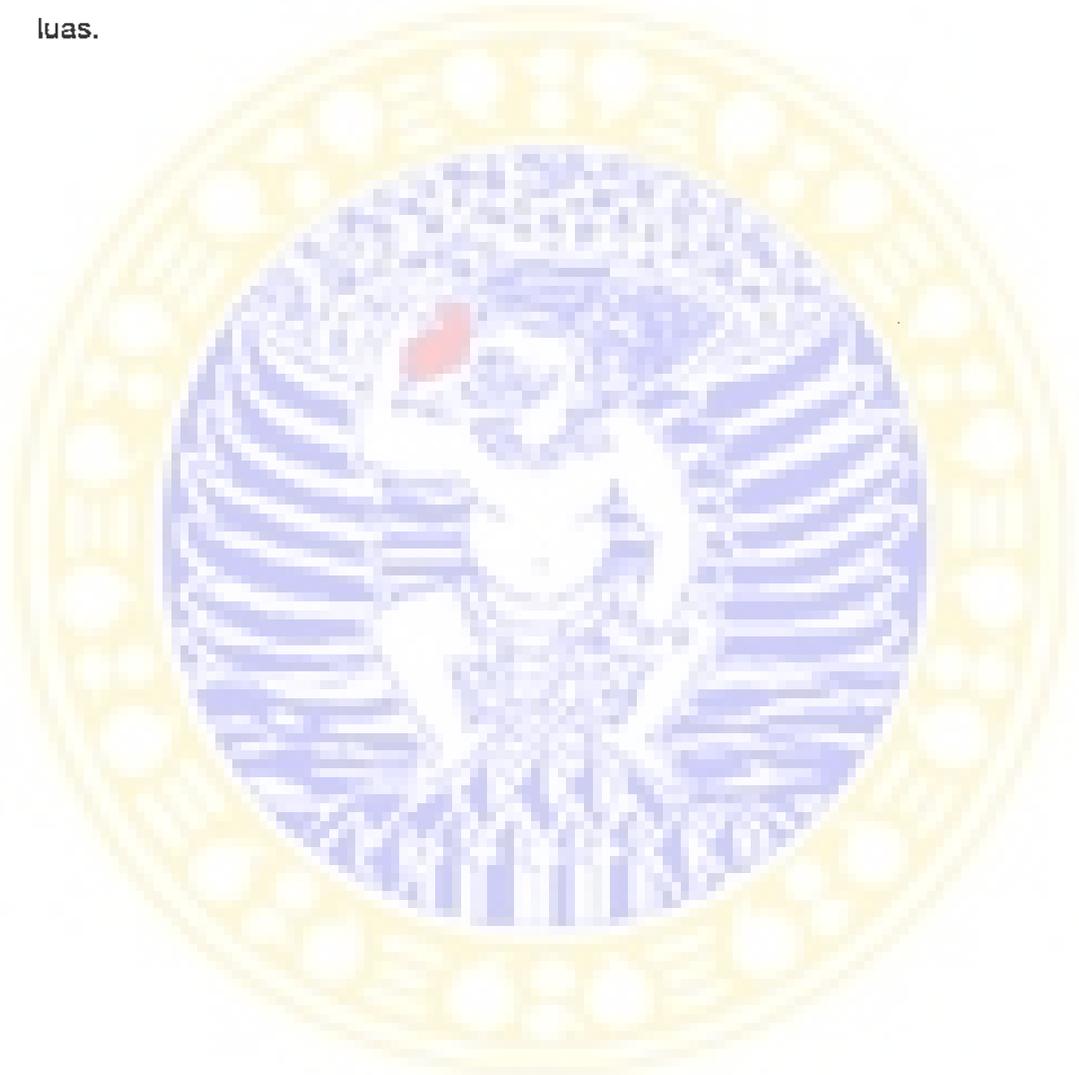
Dengan banyaknya pembangunan gedung dan bangunan lain sebagai sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung seperti perumahan atlet, gedung olah raga, stadion dan bangunan fisik lainnya maka secara otomatis tenaga kerja yang terserap mayoritas dari golongan tenaga kerja di bidang bangunan yang pada umumnya dengan tingkat keterampilan/skill yang rendah, sedangkan untuk tenaga terampilnya lebih banyak dikerjakan oleh tenaga kerja dari luar Palembang. Hal ini mengakibatkan dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak namun karena mayoritas dengan skill yang rendah maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan PDRB dan pembentukan nilai tambah sektoral.

Perencanaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi lokal merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi usaha-usaha mengurangi kesenjangan dan ketimpangan di dalam suatu wilayah. Sedangkan syarat kecukupan (*sufficient condition*) yaitu adanya *political will* dari pemerintah secara sungguh-sungguh untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan yang ada baik antar wilayah dan golongan masyarakat.

Peningkatan pembangunan tidak saja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya semakin bertambah, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik yang merupakan dampak positif dari keberhasilan pembangunan. Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa pembangunan yang semakin meningkat tersebut harus dilaksanakan di atas tanah yang luasnya terbatas baik luas wilayah secara kuantitatif, maupun secara kualitatif karena adanya ketidaksamaan potensi tanah antar wilayah.

Dalam konteks wilayah, proses pembangunan di suatu wilayah memperlihatkan adanya peningkatan pertumbuhan aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat dari waktu ke waktu, yang disertai mekanisme redistribusi

kesejahteraan yang efektif dan efisien. Proses pembangunan tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan produksi, perubahan alokasi sumber daya produksi, perubahan pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan (institusional) serta memberikan kesempatan kerja yang bersifat produktif secara luas.





**BAB 7**

**PENUTUP**

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari analisis pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan hasil studi didasarkan pada hipotesis penelitian untuk mengetahui pengaruh industrialisasi terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Palembang. Sedangkan saran-saran merupakan implementasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah-masalah dalam pembangunan. Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud sebagai berikut :

#### **7.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis studi dan pembahasan yang telah dibuktikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat disusun kesimpulan sebagai berikut :

1. Peruntukan lahan pemukiman berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, karena peruntukan lahan untuk pemukiman hanya akan memacu salah satu sektor saja yaitu bangunan (kelompok sektor sekunder) maka tenaga kerja yang terserap hanya di bidang bangunan, juga di perkotaan pada umumnya pemukiman yang terbangun kelas menengah kebawah maka tidak memacu pertumbuhan industri dan perdagangan (kelompok sektor sekunder lainnya) sehingga tidak berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja (penyerapan tenaga kerja rendah), begitu juga dengan sektor jasa (kelompok sektor tersier) juga rendah dalam penyerapan tenaga kerja. Disamping itu pemukiman di luar kota akan mendesak sektor pertanian (kelompok sektor primer) karena penambahan pemukiman akan mengurangi lahan pertanian yang akibatnya penyerapan tenaga di sektor pertanian juga berkurang.

2. Peruntukan lahan pemukiman tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan pendapatan (nilai tambah) sektoral. Hal ini dapat terjadi karena Pembangunan pemukiman ( salah satu sektor bangunan) di Kota Palembang memberikan kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan PDRB dimana sektor Bangunan dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2003 hanya memberikan kontribusi pertumbuhan PDRB yang sangat kecil yaitu dibawah 5 (lima) persen sebagai akibat rendahnya penyerapan tenaga kerja.
3. Penyerapan tenaga kerja sektoral berpengaruh nonsignifikan terhadap pembentukan pendapatan (nilai tambah) sektoral. Hal ini dapat terjadi karena belum siapnya tenaga kerja sektoral menghadapi perubahan dan rendahnya skill dari tenaga kerja yang ada. Kondisi ini mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sektoral tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah sektoral.
4. Berdasarkan ketiga kesimpulan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan secara terintegrasi bahwa dengan perkembangan peruntukan lahan untuk pemukiman belum mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pembentukan pendapatan (nilai tambah) sektoral. Hal tersebut akibat belum jelasnya perencanaan dan konsep pengembangan wilayah untuk pemukiman yang dilakukan pemerintah, dan minimnya kesiapan tenaga kerja sektoral menerima perubahan, sehingga peruntukan lahan untuk pemukiman berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah sektoral.

## 7.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kesimpulan dari studi ini, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan perencanaan secara makro termasuk pengembangan wilayah untuk pemukiman sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
2. Pemerintah sebaiknya menyiapkan dan merumuskan konsep pembangunan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas serta menyiapkan tenaga kerja yang terampil, mandiri serta mampu untuk melakukan perubahan.
3. Penyiapan peruntukan lahan untuk pemukiman sebaiknya didahului dengan menyiapkan sarana dan prasarana serta tingkat keamanan yang kondusif.
4. Tenaga kerja di Palembang agar lebih meningkatkan keterampilannya untuk dapat bersaing dalam merebut peluang yang ada.
5. Agar pihak swasta dan masyarakat lebih berperan aktif dalam mengembangkan/meningkatkan fasilitas pendidikan baik yang formal maupun non formal dan informal untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang ada di Palembang agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar Palembang.



## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999. *Makalah-makalah Kegiatan Bidang Penatagunaan Tanah Kaitannya Dengan Pembangunan Wilayah*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan STIE – YKPN, Yogyakarta, 1992.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2001. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha*.
- Johar, Ismet. 1999. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kotamadya Batam Dengan Pendekatan Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)*. Thesis. Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Mueller, R.O. 1996. *Basic principles of Structural Equation Modeling*, Springer, New York.
- Munansinghe, M. 1993. *The Economic's Approach to Sustainable Development*. Bab dari *Making Development Sustainable : From Concepts to Action*. The International Bank For Reconstruction and Development. The World Bank. Washington DC. USA.
- Nasution, Demi Hasfinul. 2002. *Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Relokasi dan Penataan Pemukiman Liar di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Kota Batam)*. Thesis. Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Parr, John B. 1987. *The Development of Spatial Structure and Regional Economic Growth*. *Land Economic*. Vol 63. No. 2. May 1987. Published ; The Board of Regents of The University of Wisconsin System.
- Perloff, Harvey S., *Et. Al.*, 1960. *Regions, Resource and Economic Growth*, The John Hopkins Press, Baltimore.
- Reksohadiprodo, S dan A.R. Karseno, 1985. *Ekonomi Perkotaan* BPFE Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Ricardson, 1977 *Dasar-dasar IlmuEekonomi Regional* LPFE UI Jakarta.
- Riddel, Robert. 1985. *Regional Development Policy. The Struggle for Rural Progress in Low-Income Nations*. Gower. Aldershot.
- Rustiadi, Ernan. 2001. *Himpunan Materi Perkuliahan Sistem Perencanaan Ekonomi Tata Ruang*. Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

- Samiadji, Bambang. 2000. *Teori Pengembangan Ekonomi Daerah*. BPFE Yogyakarta.
- Schipper, R.A. 1987. *Regional Agricultural Planning*. Notes For The Course During The Second Term of 1986/1987. Department of Development Economics Agricultural University Wageningen.
- Serageldin, I. 1993. *Making Development Sustainable*. Bab dari *Making Development Sustainable: From Concepts to Action*. The International Bank For Reconstruction and Development. The World Bank. Washington DC. USA.
- Suparmoko, M., 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: suatu Pendekatan Teoritis*, Edisi Ketiga, BPFE-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Todaro, M.P. 1994. *Pembangunan Ekonomi*. Penerjemah. Ed ke-6. Cet. II. Jakarta: Erlangga; 1999. Terjemahan dari : *Economic Development*.
- Winoto, Joyo. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Bahan Bacaan Tambahan Mata Kuliah Perencanaan Ekonomi Wilayah dan Perdesaan. Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Program Pascasarjana IPB.
- World Bank. 2000. *Cities in Transition: World Bank Urban and Local Government Strategy*. First Printing. Washington: The World Bank.



LAMPIRAN

## Lampiran I. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Primer	5	56646,00	85543,00	72542,4000	11338,38120
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Primer (%)	5	,48	,72	,5980	,10986
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Sekunder	5	3613360,00	9695337,00	6648954,6000	2585425,08075
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Sekunder (%)	5	45,29	55,45	51,1740	4,84814
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Tersier	5	4308267,00	8082536,00	5999758,4000	1503822,50016
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Tersier (%)	5	44,00	54,00	48,2280	4,74861
Valid N (listwise)	5				

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Primer	5	21438,00	35479,00	31018,0000	5551,04301
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Primer (%)	5	,70	,87	,8280	,07190
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Sekunder	5	1320941,00	1974703,00	1767213,4000	258355,65190
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Sekunder (%)	5	43,22	49,29	47,3100	2,41291
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Tersier	5	1714189,00	2164038,00	1925382,0000	177431,53353
PDRB Harga Konstan Kelompok Sektor Tersier (%)	5	49,84	56,08	51,8620	2,48283
Valid N (listwise)	5				

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Peruntukan Lahan Perumahan (ha)	5	10945,85	12396,30	11545,6700	591,44563
Peruntukan Lahan Perumahan (%)	5	29,27	33,14	30,7420	1,62036
Valid N (listwise)	5				

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Primer (orang)	5	2201,00	2472,00	2336,4000	101,55196
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Primer (%)	5	3,95	4,68	4,4560	,29288
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Sekunder (orang)	5	18784,00	22686,00	20319,2000	1481,42202
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Sekunder (%)	5	36,29	40,00	38,6620	1,41844
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Tersier (orang)	5	25974,00	37362,00	30074,0000	4372,09401
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Tersier (%)	5	55,32	59,76	56,8820	1,70954
Valid N (listwise)	5				

## Lampiran II. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori

### Factor Analysis

#### Communalities

	Initial	Extraction
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Primer (%)	1,000	,948
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Sekunder (%)	1,000	,988
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Tersier (%)	1,000	,987

Extraction Method: Principal Component Analysis.

#### Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,924	97,455	97,455	2,924	97,455	97,455
2	,076	2,545	100,000			
3	6,790E-07	2,263E-05	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

#### Component Matrix(a)

	Component
	1
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Primer (%)	,974
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Sekunder (%)	-,994
PDRB Harga Berlaku Kelompok Sektor Tersier (%)	,993

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
a 1 components extracted.

## Factor Analysis

### Communalities

	Initial	Extraction
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Primer (%)	1,000	,995
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Sekunder (%)	1,000	,998
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Tersier (%)	1,000	,999

Extraction Method: Principal Component Analysis.

### Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,992	99,720	99,720	2,992	99,720	99,720
2	,008	,280	100,000			
3	-4,969E-16	-1,656E-14	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

### Component Matrix(a)

	Component
	1
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Primer (%)	,997
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Sekunder (%)	,999
Penyerapan Tenaga Kerja Kelompok Sektor Tersier (%)	-1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a 1 components extracted.

## Lampiran III. Hasil Pengujian Asumsi Linieritas

### Curve Fit

MODEL: MOD\_1.

Independent Variable: LAHAMP Minimum value: -1,08  
The independent variable contains non-positive values. Models LOGARITHMIC and POWER cannot be calculated.

Variable: TKRJP Minimum value: -1,69683  
This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

Variable: PBRBBP Minimum value: -,78801  
This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

Independent: LAHAMP

Dependent	Mth	Rsqr	d.f.	F	Sigf	Upper bound	b0	b1	b2	b3
TKRJP	LIN	,637	3	5,26	,106	3,3E-15	-,7979			
12 TKRJP	LOG									
TKRJP	INV	,097	3	,32	,610	,1280	-,2036			
TKRJP	QUA	,967	2	29,28	,083	,9303	-,9844	-1,1629		
TKRJP	CUB	,978	1	14,96	,187	-,0040	,9129	-,2577		
-1,6375										
1 TKRJP	COM									
1 TKRJP	POW									
1 TKRJP	S									
1 TKRJP	GRO									
1 TKRJP	EXP									
1 TKRJP	LGS									
PBRBBP	LIN	,941	3	47,56	,006	1,0E-16	-,9699			
12 PBRBBP	LOG									
PBRBBP	INV	,866	3	19,34	,022	,3826	-,6085			
PBRBBP	QUA	,997	2	327,82	,003	-,3840	-,8929	,4800		
PBRBBP	CUB	,999	1	370,15	,038	-,7920	-,0645	,8753		
-,7149										
1 PBRBBP	COM									
1 PBRBBP	POW									
1 PBRBBP	S									
1 PBRBBP	GRO									
1 PBRBBP	EXP									
1 PBRBBP	LGS									

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.
- 12 Independent variable has non-positive values.

MODEL: MOD\_2.

Independent Variable: TKRJP Minimum value: -1,70  
 The independent variable contains non-positive values. Models LOGARITHMIC and POWER cannot be calculated.

Variable: PBRBBP Minimum value: -,78801  
 This variable contains non-positive values. Log transform cannot be applied. Models COMPOUND, POWER, S, GROWTH, EXPONENTIAL and LGSTIC cannot be calculated.

Independent: TKRJP

Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	Upper bound	b0	b1	b2	b3
PBRBBP	LIN	,407	3	2,06	,247	-2,E-15	,6380			
12 PBRBBP	LOG									
PBRBBP	INV	,139	3	,49	,536	,1485	,0136			
PBRBBP	QUA	,678	2	2,11	,322	-,6562	1,4713	,8203		
PBRBBP	CUB	,681	1	,71	,679	-,7118	1,8415	,6367		
- ,2490										
1 PBRBBP	COM									
1 PBRBBP	POW									
1 PBRBBP	S									
1 PBRBBP	GRO									
1 PBRBBP	EXP									
1 PBRBBP	LGS									

Notes:

- 1 Dependent variable has non-positive values; no equation estimated.  
 12 Independent variable has non-positive values.

## Lampiran IV. Hasil-Hasil Analisis Path (Perumahan Data %)

### A. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

# Regression

#### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Peruntukan Lahan Perumahan %(a)		Enter

a All requested variables entered.  
b Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja (%)

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,950(a)	,902	,869	,36141294

a Predictors: (Constant), Peruntukan Lahan Perumahan (%)

#### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,608	1	3,608	27,623	,013(a)
	Residual	,392	3	,131		
	Total	4,000	4			

a Predictors: (Constant), Peruntukan Lahan Perumahan (%)  
b Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja (%)

#### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,645E-15	,162		,000	1,000
	Peruntukan Lahan Perumahan (%)	-,950	,181	-,950	-5,256	,013

a Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja (%)

# Regression

## Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penyerapan Tenaga Kerja (%), Peruntukan Lahan Perumahan %(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: PDRB ADH Berlaku (%)

## Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786(a)	,619	,237	,87342598

a Predictors: (Constant), Penyerapan Tenaga Kerja (%), Peruntukan Lahan Perumahan (%)

## ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,474	2	1,237	1,622	,381(a)
	Residual	1,526	2	,763		
	Total	4,000	4			

a Predictors: (Constant), Penyerapan Tenaga Kerja (%), Peruntukan Lahan Perumahan (%)

b Dependent Variable: PDRB ADH Berlaku (%)

## Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,527E-15	,391		,000	1,000
	Peruntukan Lahan Perumahan (%)	-1,470	1,395	-1,470	-1,053	,403
	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	-,758	1,395	-,758	-,543	,641

a Dependent Variable: PDRB ADH Berlaku (%)

## B. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

# Regression

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Peruntukan Lahan Perumahan (%) <sup>(a)</sup>		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja (%)

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,950 <sup>(a)</sup>	,902	,869	,36141294

a Predictors: (Constant), Peruntukan Lahan Perumahan (%)

### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,608	1	3,608	27,623	,013 <sup>(a)</sup>
	Residual	,392	3	,131		
	Total	4,000	4			

a Predictors: (Constant), Peruntukan Lahan Perumahan (%)

b Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja (%)

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,645E-15	,162		,000	1,000
	Peruntukan Lahan Perumahan (%)	-,950	,181	-,950	-5,256	,013

a Dependent Variable: Penyerapan Tenaga Kerja (%)

# Regression

## Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penyerapan Tenaga Kerja (%), Peruntukan Lahan Perumahan %(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: PDRB ADH Konstan (%)

## Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,290(a)	,084	-,832	1,35360310

a Predictors: (Constant), Penyerapan Tenaga Kerja (%), Peruntukan Lahan Perumahan (%)

## ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,336	2	,168	,092	,916(a)
	Residual	3,664	2	1,832		
	Total	4,000	4			

a Predictors: (Constant), Penyerapan Tenaga Kerja (%), Peruntukan Lahan Perumahan (%)

b Dependent Variable: PDRB ADH Konstan (%)

## Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,436E-15	,605		,000	1,000
	Peruntukan Lahan Perumahan (%)	,141	2,162	,141	,065	,954
	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	-,152	2,162	-,152	-,070	,950

a Dependent Variable: PDRB ADH Konstan (%)

## LAMPIRAN V

**PERTUMBUHAN DAN DISTRIBUSI PDRB KOTA PALEMBANG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1999-2003 (JUTA RUPIAH)**

No.	Lapangan Usaha	1999	(%)	2000	(%)	2001	(%)	2002	(%)	2003	(%)	Pertumbuhan Setahun (%)
1	Pertanian	21.438	0,70	31.593	0,87	32.610	0,86	33.970	0,86	35.479	0,85	13,42
A	PRIMER	21.438	0,70	31.593	0,87	32.610	0,86	33.970	0,86	35.479	0,85	13,42
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	1.122.534	36,73	1.591.118	43,76	1.634.967	43,17	1.672.126	42,18	1.734.332	41,55	11,49
4	Listrik, Gas & Air Bersih	70.960	2,32	74.270	2,04	77.158	2,04	78.991	1,99	79.378	1,90	2,84
5	Bangunan	127.447	4,17	126.682	3,48	136.758	3,61	148.353	3,74	160.993	3,86	6,02
B	SEKUNDER	1.320.941	43,22	1.792.070	49,29	1.848.883	48,82	1.899.470	47,91	1.974.703	47,31	10,57
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	728.034	23,82	822.208	22,61	880.907	23,26	955.267	24,10	1.028.710	24,64	9,03
7	Pengangkutan & Komunikasi	385.859	12,62	445.783	12,26	462.473	12,21	488.255	12,32	517.733	12,40	7,83
8	Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	259.940	8,50	209.133	5,75	219.268	5,79	228.774	5,77	239.754	5,74	(2,00)
9	Jasa-jasa (Pemerintahan & Swasta)	340.356	11,14	334.975	9,21	342.982	9,06	358.658	9,05	377.841	9,05	2,65
C	TERSIER	1.714.189	56,08	1.812.099	49,84	1.905.630	50,32	2.030.954	51,23	2.164.038	51,84	6,00
	PDRB KOTA PALEMBANG DENGAN MIGAS	3.056.588	100,00	3.635.762	100,00	3.787.123	100,00	3.964.394	100,00	4.174.220	100,00	8,10
	PDRB KOTA PALEMBANG TANPA MIGAS	2.731.425	XX	2.869.762	XX	2.998.215	XX	3.179.588	XX	3.370.853	XX	5,40

Sumber : BPS, "PDRB Kota Palembang, 2003", disusun dan diolah kembali.

## LAMPIRAN VI

**PERTUMBUHAN DAN DISTRIBUSI PDRB KOTA PALEMBANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1999-2003 (JUTA RUPIAH)**

No.	Lapangan Usaha	1999	(%)	2000	(%)	2001	(%)	2002	(%)	2003	(%)	Pertumbuhan Setahun (%)
1	Pertanian	56.646	0,71	67.032	0,72	73.083	0,55	80.408	0,53	85.543	0,48	10,85
A	PRIMER	56.646	0,71	67.032	0,72	73.083	0,55	80.408	0,53	85.543	0,48	10,85
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	3.156.205	39,58	3.798.400	40,57	6.717.809	50,66	7.495.470	49,50	8.730.053	48,87	28,96
4	Listrik, Gas & Air Bersih	112.494	1,41	140.895	1,50	153.054	1,15	166.447	1,10	290.104	1,62	26,72
5	Bangunan	344.661	4,32	416.879	4,45	482.154	3,64	564.968	3,73	675.180	3,78	18,31
B	SEKUNDER	3.613.360	45,29	4.356.174	46,53	7.353.017	55,45	8.226.885	54,33	9.695.337	54,27	27,99
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.687.405	21,15	2.035.615	21,74	2.423.380	18,27	2.906.862	19,20	3.498.452	19,58	20,00
7	Pengangkutan & Komunikasi	1.168.019	14,64	1.349.508	14,41	1.582.359	11,93	1.771.206	11,70	2.056.973	11,52	15,20
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	686.131	8,60	569.776	6,09	688.713	5,19	805.419	5,32	915.120	5,12	7,47
9	Jasa-jasa (Pemerintahan & Swasta)	766.712	9,61	984.723	10,52	1.140.105	8,60	1.350.323	8,92	1.611.991	9,02	20,42
C	TERSIER	4.308.267	54,00	4.939.622	52,76	5.834.557	44,00	6.833.810	45,13	8.082.536	45,25	17,03
	PDRB KOTA PALEMBANG DENGAN MIGAS	7.978.273	100,00	9.362.828	100,00	13.260.657	100,00	15.141.103	100,00	17.863.416	100,00	22,32
	PDRB KOTA PALEMBANG TANPA MIGAS	7.206.464	XX	8.019.471	XX	9.301.817	XX	10.756.856	XX	12.661.098	XX	15,13

Sumber : BPS, "PDRB Kota Palembang, 2003", disusun dan diolah kembali.

## LAMPIRAN VII

**PERTUMBUHAN DAN DISTRIBUSI PDRB PROPINSI SUMATERA SELATAN  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1993-2003 (JUTA RUPIAH)**

No.	Lapangan Usaha	1993	(%)	1998	(%)	2003	(%)	Pertumbuhan Setahun (%)		
								'93-'98	'98-'03	'93-'03
1	Pertanian	2.048.038	18,80	6.582.951	19,84	8.992.370	16,42	26,23	6,50	15,95
A	PRIMER	2.048.038	18,80	6.582.951	19,84	8.992.370	16,42	26,23	6,50	15,95
2	Pertambangan & Penggalian	1.693.788	15,46	8.301.731	25,10	10.343.727	18,89	37,59	4,50	19,91
3	Industri Pengolahan	2.302.318	21,14	7.018.336	21,22	12.911.897	23,58	24,97	12,97	18,82
4	Listrik, Gas & Air Bersih	64.541	0,59	164.798	0,50	444.267	0,81	20,62	21,94	21,28
5	Konstruksi	438.185	4,02	1.547.223	4,68	2.935.427	5,36	28,70	13,66	20,95
B	SEKUNDER	4.488.832	41,21	17.032.088	51,50	26.635.318	48,65	30,57	9,35	19,49
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.891.722	26,55	5.094.247	15,40	11.241.331	20,53	11,99	17,15	14,54
7	Pengangkutan & Komunikasi	516.377	4,74	1.203.210	3,64	2.531.282	4,62	18,43	16,04	17,23
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	317.957	2,92	1.407.367	4,26	1.965.313	3,59	34,65	6,91	19,98
9	Jasa-jasa (Pemerintahan & Swasta)	629.909	5,78	1.771.650	5,36	3.382.601	6,18	22,98	13,81	18,30
C	TERSIER	4.355.965	39,99	9.476.474	28,65	19.120.528	34,92	16,82	15,07	15,94
	<b>PDRB SUMATERA SELATAN</b>	<b>10.892.835</b>	<b>100,00</b>	<b>33.071.513</b>	<b>100,00</b>	<b>54.748.216</b>	<b>100,00</b>	<b>24,87</b>	<b>10,61</b>	<b>17,52</b>

Sumber : BPS, "Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1988-1993, 1996-1999, 2000-2003", disusun dan diolah kembali.

## LAMPIRAN VII

**PERTUMBUHAN DAN DISTRIBUSI PDRB PROPINSI SUMATERA SELATAN  
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1993-2003 (JUTA RUPIAH)**

No.	Lapangan Usaha	1993	(%)	1998	(%)	2003	(%)	Pertumbuhan Setahun (%)		
								'93-'98	'98-'03	'93-'03
1	Pertanian	2.048.038	18,80	2.778.719	20,99	2.761.666	20,68	6,29	(0,12)	3,03
A	PRIMER	2.048.038	18,80	2.778.719	20,99	2.761.666	20,68	6,29	(0,12)	3,03
2	Pertambangan & Penggalian	1.683.788	15,46	2.264.414	17,10	2.079.263	15,57	6,10	(1,69)	2,13
3	Industri Pengolahan	2.302.318	21,14	2.703.764	20,42	2.799.270	20,96	3,27	0,70	1,97
4	Listrik, Gas & Air Bersih	64.541	0,59	115.821	0,87	110.907	0,83	12,41	(0,86)	5,56
5	Konstruksi	438.185	4,02	749.499	5,66	808.997	6,06	11,33	1,54	6,32
B	SEKUNDER	4.488.832	41,21	5.833.498	44,06	5.796.437	43,42	5,38	(0,12)	2,59
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.891.722	26,55	2.393.505	16,08	2.618.079	19,61	(3,71)	1,81	(0,99)
7	Pengangkutan & Komunikasi	516.377	4,74	658.460	4,97	744.481	5,58	4,98	2,49	3,73
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	317.957	2,92	618.605	4,67	519.462	3,89	14,24	(3,43)	5,03
9	Jasa-jasa (Pemerintahan & Swasta)	629.909	5,78	956.534	7,22	910.687	6,82	8,71	(0,98)	3,76
C	TERSIER	4.355.965	39,99	4.627.104	34,95	4.792.709	35,89	1,22	0,71	0,96
	PDRB SUMATERA SELATAN	10.892.835	100,00	13.239.321	100,00	13.352.812	100,00	3,98	0,17	2,06

Sumber : BPS, "Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1988-1993, 1996-1999, 2000-2003", disusun dan diolah kembali.

**LAMPIRAN IX**  
**JUMLAH, DISTRIBUSI DAN PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA**  
**ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 1993-2003 (DALAM MILYAR RUPIAH)**

No.	Sektor	1993	(%)	1998	(%)	2003	(%)	Pertumbuhan Setahun (%)
1.	<b>PERTANIAN</b>	58.963,4	17,88	172.827,6	18,08	296.237,6	16,58	17,52
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	32.093,4	9,73	91.346,0	9,56	146.349,7	8,19	16,39
	1.2. Tanaman Perkebunan	9.014,8	2,73	33.289,6	3,48	47.049,5	2,63	17,97
	1.3. Peternakan	6.202,7	1,88	15.743,6	1,65	39.043,1	2,19	20,20
	1.4. Kehutanan	6.267,6	1,90	11.700,5	1,22	19.001,5	1,06	11,73
	1.5. Perikanan	5.384,9	1,63	20.747,9	2,17	44.793,8	2,51	23,60
A.	<b>PRIMER</b>	58.963,4	17,88	172.827,6	18,08	296.237,6	16,58	17,52
2.	<b>PERTAMBANGAN DAN GALIAN</b>	31.497,3	9,55	120.328,5	12,59	191.176,9	10,70	19,76
	2.1. Minyak dan Gas Bumi	23.120,8	7,01	74.883,7	7,84	123.643,1	6,92	18,25
	2.2. Pertambangan Lainnya	8.376,5	2,54	45.444,8	4,75	67.533,8	3,78	23,21
3.	<b>INDUSTRI</b>	73.556,5	22,30	238.897,0	25,00	440.451,8	24,65	19,60
	3.1. Indust. Pengol. Non Migas	63.762,7	19,34	205.724,6	21,52	372.348,1	20,84	19,30
	3.2. Pengilangan Minyak Bumi	5.540,5	1,68	15.092,2	1,58	39.291,1	2,20	21,64
	3.3. Gas Alam Cair	4.253,3	1,29	18.080,2	1,89	28.812,6	1,61	21,08
4.	<b>LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>	3.290,2	1,00	11.283,1	1,18	39.665,4	2,22	28,27
5.	<b>BANGUNAN</b>	22.512,9	6,83	61.761,6	6,46	107.118,8	6,00	16,88
B.	<b>SEKUNDER</b>	130.856,9	39,68	432.270,2	45,23	778.412,9	43,57	19,52
6.	<b>PERDAGANGAN, HOTEL &amp; RESTORAN</b>	55.297,6	16,77	146.740,1	15,35	291.589,7	16,32	18,09
	6.1. Perdag. Besar & Eceran	44.604,8	13,53	116.688,5	12,21	232.391,9	13,01	17,95
	6.2. Hotel dan Restoran	10.692,8	3,24	30.051,6	3,14	59.197,8	3,31	18,66
7.	<b>PENGANGKUTAN &amp; KOMUNIKASI</b>	23.248,9	7,05	51.937,2	5,43	111.727,7	6,25	17,00
	7.1. Pengangkutan	20.101,2	6,10	41.837,2	4,38	81.036,3	4,54	14,96
	7.2. Komunikasi	3.147,7	0,95	10.100,0	1,06	30.691,4	1,72	25,57
8.	<b>KEUANGAN, PERSEWAAN &amp; JASA PERUSAHAAN</b>	28.047,8	8,51	69.891,7	7,31	123.000,7	6,88	15,93
9.	<b>JASA - JASA</b>	33.361,5	10,12	82.086,8	8,59	185.722,3	10,39	18,73
C.	<b>TERSIER</b>	139.955,8	42,44	350.655,7	36,69	712.040,4	39,85	17,67
	<b>JUMLAH PDB INDONESIA</b>	329.776,1	100,00	955.753,5	100,00	#####	100,00	18,41

Sumber : - Biro Pusat Statistik, "Laporan Kepala Biro Pusat Statistik Tentang Penggeseran Tahun Dasar PDB Dari 1983 ke 1993",  
- Badan Pusat Statistik, Jakarta, "Statistik Indonesia Tahun 2000",  
- Badan Pusat Statistik, Jakarta, "Statistik Indonesia Tahun 2003",  
disusun dan diolah kembali.

## LAMPIRAN X

**JUMLAH, DISTRIBUSI DAN PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA  
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1993, TAHUN 1993-2003 (DALAM MILYAR RUPIAH)**

No.	Sektor	1993	(%)	1998	(%)	2003	(%)	Pertumbuhan Setahun (%)
1	PERTANIAN	58.963,4	17,88	63.609,5	16,90	70.374,4	15,83	1,78
	1.1. Tanaman Buah Makanan	32.093,4	9,73	33.350,4	8,86	35.070,1	7,89	0,89
	1.2. Tanaman Perkebunan	9.014,8	2,71	10.501,8	2,79	12.417,2	2,79	3,25
	1.3. Peternakan	6.202,7	1,88	6.439,7	1,71	7.745,2	1,74	2,25
	1.4. Kehutanan	6.267,6	1,90	6.580,7	1,75	6.658,9	1,50	0,61
	1.5. Perikanan	5.384,9	1,63	6.736,9	1,79	8.483,0	1,91	4,65
A.	PRIMER	58.963,4	17,88	63.609,5	16,90	70.374,4	15,83	1,78
2	PERTAMBANGAN DAN GALIAN	31.497,3	9,55	37.474,0	9,96	40.590,8	9,13	2,57
	2.1. Minyak dan Gas Bumi	23.120,8	7,01	23.340,1	6,20	20.358,2	4,58	(1,26)
	2.2. Pertambangan Lainnya	8.376,5	2,54	14.133,9	3,76	20.232,6	4,55	9,22
3	INDUSTRI	73.556,5	22,30	95.320,7	25,33	115.900,7	26,08	4,65
	3.1. Indust. Pengol. Non Migas	63.762,7	19,34	84.278,4	22,39	104.502,1	23,51	5,06
	3.2. Pengilangan Minyak Bumi	5.540,5	1,68	6.310,0	1,68	6.767,8	1,52	2,02
	3.3. Gas Alam Cair	4.253,3	1,29	4.732,3	1,26	4.630,8	1,04	0,85
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	3.290,2	1,00	5.646,1	1,50	8.052,2	1,81	9,36
5	BANGUNAN	22.512,9	6,83	22.465,3	5,97	27.196,2	6,12	1,91
B.	SEKUNDER	130.856,9	39,68	160.906,1	42,75	191.739,9	43,14	3,89
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	55.297,6	16,77	60.130,7	15,98	70.891,4	15,95	2,52
	6.1. Perdag. Besar & Eceran	44.604,8	13,53	47.845,9	12,71	55.766,9	12,55	2,26
	6.2. Hotel dan Restoran	10.692,8	3,24	12.284,8	3,26	15.124,5	3,40	3,53
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	23.248,9	7,05	26.975,0	7,17	37.475,5	8,43	4,89
	7.1. Pengangkutan	20.101,2	6,10	20.503,8	5,45	25.507,4	5,74	2,41
	7.2. Komunikasi	3.147,7	0,95	6.471,3	1,72	11.968,1	2,69	14,29
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	28.047,8	8,51	28.278,7	7,51	32.512,5	7,32	1,49
9	JASA - JASA	33.361,5	10,12	36.475,0	9,69	41.459,9	9,33	2,20
C.	TERSIER	139.955,8	42,44	151.859,3	40,35	182.339,2	41,03	2,68
	JUMLAH PDB INDONESIA	329.776,1	100,00	376.374,9	100,00	444.453,5	100,00	3,03

Sumber : - Biro Pusat Statistik, "Laporan Kepala Biro Pusat Statistik Tentang Penggeseran Tahun Dasar PDB Dari 1983 ke 1993",  
 - Badan Pusat Statistik, Jakarta, "Statistik Indonesia Tahun 2000",  
 - Badan Pusat Statistik, Jakarta, "Statistik Indonesia Tahun 2003",  
 disusun dan diolah kembali.

## LAMPIRAN XI

## PERUNTUKAN LAHAN KOTA PALEMBANG TAHUN 1999 - 2003

No.	PERUNTUKAN LAHAN	TAHUN									
		1999		2000		2001		2002		2003	
		Ha	%								
1.	Pertanian	12.402,83	33,16	12.402,83	33,16	12.730,33	34,04	13.323,79	35,62	13.317,29	35,60
2.	Peternakan	37,40	0,10	37,40	0,10	37,40	0,10	52,36	0,14	52,36	0,14
3.	Hutan	225,00	0,57	225,00	0,57	225,00	0,57	225,00	0,57	225,00	0,57
4.	Semak	2.165,64	5,79	2.068,39	5,53	1.889,84	5,05	1.679,39	4,49	1.193,02	3,19
5.	Rawa	5.823,05	15,58	5.763,80	15,41	4.921,79	13,16	3.714,12	9,93	3.397,37	9,08
6.	Perairan (Kolam/waduk/Danau)	3.172,45	8,48	3.179,25	8,50	3.192,35	8,54	3.268,25	8,74	3.277,60	8,95
7.	Perumahan	10.945,85	29,27	11.067,55	29,59	11.484,05	30,07	11.834,60	31,64	12.396,30	33,14
8.	Lain-lain (jalan,sungai)	993,79	2,66	1.001,84	2,71	1.099,00	2,94	1.145,00	3,06	1.172,00	3,13
<b>A</b>	<b>PRIMER</b>	<b>35.766,01</b>	<b>95,61</b>	<b>35.746,29</b>	<b>95,57</b>	<b>35.579,76</b>	<b>94,47</b>	<b>35.332,51</b>	<b>94,19</b>	<b>35.030,94</b>	<b>93,61</b>
9.	Industri	439,87	1,17	441,35	1,18	454,75	1,87	570,85	1,56	583,35	1,61
<b>B</b>	<b>SEKUNDER</b>	<b>439,87</b>	<b>1,17</b>	<b>441,35</b>	<b>1,18</b>	<b>454,75</b>	<b>1,87</b>	<b>570,85</b>	<b>1,56</b>	<b>583,35</b>	<b>1,61</b>
10.	Perusahaan/Perdagangan	283,30	0,78	295,25	0,79	404,38	1,08	456,10	1,46	684,12	1,83
11.	Jasa	913,82	2,44	920,11	2,46	964,11	2,58	1.043,54	2,79	1.104,59	2,95
<b>C</b>	<b>TERSIER</b>	<b>1.197,12</b>	<b>3,22</b>	<b>1.215,36</b>	<b>3,25</b>	<b>1.368,49</b>	<b>3,66</b>	<b>1.499,64</b>	<b>4,25</b>	<b>1.786,71</b>	<b>4,78</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>37.403,00</b>	<b>100,00</b>								

Sumber : Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan.

## LAMPIRAN XII

## PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL DI KOTA PALEMBANG

No.	SEKTOR	TAHUN									
		1999		2000		2001		2002		2003	
		Jumlah	%								
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan	2.201,00	4,68	2.285,00	4,61	2.345,00	4,57	2.379,00	4,47	2.472,00	3,95
<b>A</b>	<b>PRIMER</b>	2.201,00	4,68	2.285,00	4,61	2.345,00	4,57	2.379,00	4,47	2.472,00	3,95
2	Pertambangan	182,00	0,38	193,00	0,39	205,00	0,39	212,00	0,40	238,00	0,38
3	Industri Pengolahan	12.620,00	26,88	13.101,00	26,41	13.524,00	26,37	13.718,00	25,75	13.965,00	22,34
4	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Konstruksi Bangunan	5.982,00	12,74	6.176,00	12,45	6.377,00	12,43	6.620,00	12,43	8.483,00	13,57
<b>B</b>	<b>SEKUNDER</b>	18.784,00	40,00	19.470,00	39,25	20.106,00	39,19	20.550,00	38,58	22.686,00	36,29
6	Perdagangan	14.220,00	30,28	14.680,00	29,60	15.240,00	29,70	16.267,00	30,54	21.651,00	34,63
7	Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	2.371,00	5,05	2.445,00	4,93	2.509,00	4,89	2.609,00	4,90	3.072,00	4,91
8	Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahaan	6.178,00	13,16	6.378,00	12,86	6.621,00	12,91	6.835,00	12,83	7.046,00	11,27
9	Jasa Kemasyarakatan Sosial dan perorangan	3.205,00	6,83	4.341,00	8,75	4.482,00	8,74	4.627,00	8,68	5.593,00	8,95
<b>C</b>	<b>TERSIER</b>	25.974,00	55,32	27.844,00	56,14	28.852,00	56,24	30.338,00	56,95	37.362,00	59,76
	<b>TOTAL</b>	46.959,00	100,00	49.599,00	100,00	51.303,00	100,00	53.267,00	100,00	62.520,00	100,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

